

KAJIAN EKONOMI REGIONAL

Provinsi Riau

Triwulan III - 2007

VISI BANK INDONESIA :

“Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”

MISI BANK INDONESIA :

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan”

NILAI-NILAI STRATEGIS ORGANISASI BANK INDONESIA :

“Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan”

KATA PENGANTAR

BUKU Kajian Ekonomi Regional (KER) Provinsi Riau ini merupakan terbitan rutin triwulanan yang berisi potret perkembangan ekonomi dan perbankan di Propinsi Riau. Terbitan kali ini memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan di Propinsi Riau pada triwulan III - 2007 dengan penekanan kajian pada kondisi ekonomi makro regional (PDRB, Keuangan Daerah, Investasi, dan Ekspor-Import), Inflasi, moneter dan perbankan, sistem pembayaran, ketenagakerjaan serta perkiraan perkembangan ekonomi daerah pada triwulan IV - 2007. Analisis dilakukan berdasarkan data laporan bulanan bank umum dan BPR, data ekspor-impor yang diolah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, data PDRB dan inflasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) propinsi Riau, data PMDN dan PMA dari BPI Propinsi Riau serta data dari instansi terkait lainnya.

Tujuan dari penyusunan buku KER ini adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Propinsi Riau, dengan harapan kajian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyempurnakan buku ini. Oleh karena itu kritik, saran dan dukungan *supply* data sangatlah diharapkan.

Pekanbaru, November 2007

BANK INDONESIA PEKANBARU

ttd

Gatot Sugiono
Pemimpin

DAFTAR	ISI
--------	-----

	HALAMAN
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	x
 RINGKASAN EKSEKUTIF	1
 BAB 1. KONDISI EKONOMI MAKRO REGIONAL	6
I	6
Pertumbuhan PDRB.....	
1. Kondisi Umum.....	6
2. PDRB Dari Sisi Permintaan.....	7
2.1. PDRB Tanpa Migas	7
2.2. PDRB Dengan Migas	9
3. PDRB dari Sisi Penawaran	11
3.1. PDRB Tanpa Migas	11
3.2. PDRB Dengan Migas	16
II Keuangan Daerah.....	18
1. Kondisi Umum	18
2. Realisasi APBD Riau Tahun 2007.....	18
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (APBD-P)	21
4. Posisi Gabungan Keuangan Daerah (Propinsi dan Kabupaten/ Kota) Semester I - 2007.....	23
III Pengembangan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).....	25
1. Persetujuan dan Realisasi PMDN dan PMA.....	25

2	Peringkat realisasi PMDN dan PMA.....	26
IV	Perkembangan Ekspor-Import Non Migas.....	27
1.	Ekspor Non Migas.....	28
2.	Import Non Migas.....	30
3.	Nilai Ekspor Non Migas dan Import Non Migas Menurut Valuta dan Cara Pembayaran.....	31
BOKS 1	Upaya Perbaikan Infrastruktur Jalan Perlu Mendapat Prioritas Pemerintah Daerah	
BAB 2.	PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	33
1.	Kondisi Umum.....	33
2.	Perkembangan dan Faktor Penyebab Inflasi Kota Pekanbaru	34
3.	Perkembangan Komponen-komponen Inflasi di Kota Pekanbaru.....	38
BAB 3.	PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH.....	40
1.	Kondisi Umum.....	40
2.	Perkembangan Moneter	41
3.	Perkembangan Perbankan	42
3.1.	Bank Umum	42
3.1.1.	Jaringan Kantor	42
3.1.2.	Perkembangan Aset	44
3.1.3.	Kredit	44
3.1.3.1.	Perkembangan Penyaluran Kredit.....	44
3.1.3.2.	Konsentrasi Kredit	45
3.1.3.3.	Undisbursed Loan dan Persetujuan Kredit Baru	48
3.1.3.4.	Kualitas Kredit	49
3.1.4.	Intermediasi Perbankan	51
3.1.4.1.	Perkembangan LDR	51
3.1.4.2.	Perkembangan Penyaluran Kredit	

	UMKM.....	52
3.1.5.	Kondisi Likuiditas	54
	3.1.5.1. Perkembangan dan Struktur Dana Pihak Ketiga	54
	3.1.5.2. Rasio Alat Liquid	57
3.1.6.	Profitabilitas	59
	3.1.6.1. Spread Bunga	59
	3.1.6.2. Komposisi Pendapatan Bunga dan Beban Bunga	60
	3.1.6.3. Perkembangan Laba Rugi	61
3.2.	Bank Perkreditan Rakyat	62
3.3.	Bank Syariah	63
BOKS 2	Obligasi Negara Ritel (ORI) Versus Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan di Provinsi Riau	
BAB 4	Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah.....	65
	1. Kondisi Umum.....	65
	2. Ketenagakerjaan Daerah	66
	3. Kesejahteraan.....	68
BAB 5	Perkembangan Sistem Pembayaran.....	71
	1. Kondisi Umum.....	71
	2. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai.....	72
	2.1. Aliran uang masuk/keluar	72
	2.2. Penyediaan uang kartal layak edar.....	73
	2.3. Uang Palsu.....	73
	3. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai.....	74
	3.1. Kliring.....	74
	3.2. Transaksi <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS).....	74
	4. Lainnya	75
	4.1. Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing.....	75
	4.2. Strategi <i>Cash Centre</i>	76
BAB 6	Prospek Ekonomi	77

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1.	Pertumbuhan PDRB Riau Tanpa Migas Menurut Penggunaan (% _{y-o-y}).....	6
Tabel 1.2.	Struktur Komponen Penggunaan Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (% _{y-o-y}).....	8
Tabel 1.3.	Pertumbuhan PDRB Riau Dengan Migas Menurut Penggunaan (% _{y-o-y}).....	9
Tabel 1.4.	Struktur Komponen Penggunaan Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (% _{y-o-y}).....	10
Tabel 1.5.	Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas (% _{y-o-y}).....	12
Tabel 1.6.	Struktur Sektor Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (% _{y-o-y}).....	14
Tabel 1.7.	Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas (% _{y-o-y}).....	15
Tabel 1.8.	Struktur Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas (% _{y-o-y}).....	16
Tabel 1.9.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Semester I-2007.....	18
Tabel 1.10.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi s/d Triwulan II – 2007.....	19
Tabel 1.11.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).....	20
Tabel 1.12.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau Tahun Anggaran 2007.....	23
Tabel 1.13.	Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Surat Perjanjian Menurut Sektor Di Provinsi Riau (Periode : Januari s/d Juni 2007).....	24
Tabel 1.14.	Nilai Investasi PMA Menurut Sektor Di Provinsi Riau (Periode : Januari s/d Juni 2007).....	25
Tabel 1.15.	Peringkat Realisasi Investasi PMA dan PMDN Menurut Lokasi Periode Januari s/d Agustus 2007.....	26
Tabel 1.16.	Perkembangan Ekspor-Impor Provinsi Riau Periode Januari s.d. Agustus 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD).....	27
Tabel 1.17.	Ekspor Komoditas Unggulan Propinsi Riau Periode Januari s.d.	

	Agustus 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD).....	27
Tabel 1.18.	Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli Periode Januari - Agustus 2006 dan 2007 (dalam juta USD).....	29
Tabel 1.19.	Impor Komoditas Unggulan Propinsi Riau Januari s.d. Agustus 2006 dan 2007 (dalam jutaan USD).....	29
Tabel 1.20.	Impor Non Migas Menurut Negara Penjual Provinsi Riau Januari s.d. Agustus 2006 dan 2007 (dalam juta USD).....	30
Tabel 1.21.	Nilai Ekspor Non Migas Propinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran Januari s.d. Agustus 2006 dan 2007(dalam juta USD)..	30
Tabel 1.22.	Nilai Impor Non Migas Provinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran Januari s.d. Agustus 2006 dan 2007 (dalam juta USD)	31
Tabel 2.1.	Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa Triwulan III Tahun 2007.....	34
Tabel 2.2.	Perkembangan Komoditas yang Mengalami Inflasi dan Kontribusi Tertinggi Selama Triwulan III Tahun 2007.....	35
Tabel 3.1.	Perkembangan Bank di Propinsi Riau.....	41
Tabel 3.2.	Jaringan Kantor Bank Umum di Propinsi Riau (September 2007).....	42
Tabel 3.3.	Data ATM Perbankan Per Kabupaten/Kota di Propinsi Riau.....	42
Tabel 3.4.	Posisi Kredit di Propinsi Riau.....	44
Tabel 3.5.	Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II Propinsi Riau	47
Tabel 3.6.	Persetujuan Kredit Baru di Propinsi Riau	48
Tabel 3.7.	NPLs Per Sektor Ekonomi di Propinsi Riau	49
Tabel 3.8.	NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten di Propinsi Riau	50
Tabel 3.9.	Perkembangan Kredit UMKM di Propinsi Riau	51
Tabel 3.10.	Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi di Propinsi Riau	52
Tabel 3.11.	Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Propinsi Riau.....	53
Tabel 3.12.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Propinsi Riau	54
Tabel 3.13.	Sebaran DPK Menurut Kepemilikan di Propinsi Riau	55
Tabel 3.14.	Penghimpunan DPK Berdasarkan Kota/Kabupaten di Propinsi Riau ..	55
Tabel 3.15.	Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal di Propinsi Riau	56
Tabel 3.16.	Perkembangan Alat Likuid dan <i>Non Core Deposit</i>	57
Tabel 3.17.	Perkembangan Usaha BPR/BPRS di Propinsi Riau	61
Tabel 3.18.	Perkembangan Usaha BPR/BPRS Di Provinsi Riau	61

Tabel 3.19.	Indikator Kinerja Utama BPR/BPRS Di Provinsi Riau.....	62
Tabel 3.20.	Indikator Kinerja Utama Bank Syariah Di Provinsi Riau.....	62
Tabel 4.1.	Struktur Penduduk Provinsi Riau.....	65
Tabel 4.2.	Jumlah Tenaga Kerja per jenjang Pendidikan di Provinsi Riau.....	66
Tabel 4.3	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur di Provinsi Riau.....	66
Tabel 4.4.	Jumlah Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Riau.....	67
Tabel 4.5.	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Riau.....	68
Tabel 4.6.	Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.....	68
Tabel 4.7.	Garis Kemiskinan di Provinsi Riau.....	68
Tabel 4.8.	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Riau.....	69
Tabel 5.1.	Perkembangan Kliring di Provinsi Riau.....	73
Tabel 5.2.	Perkembangan Transaksi RTGS.....	74
Tabel 5.3.	Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing.....	75

	HALAMAN
Grafik 1.1. Perkembangan PDRB Riau (% ,y-o-y).....	6
Grafik 1.2. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas (% ,y-o-y).....	13
Grafik 1.3. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas Triwulan (% ,y-o-y).....	16
Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru.....	33
Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru dan Nasional secara Bulanan.....	36
Grafik 2.3. Inflasi kota Pekanbaru dan Nasional.....	36
Grafik 2.4. Perkembangan Komponen-Komponen Inflasi.....	37
Grafik 2.5. Disagregasi Inflasi di Kota Pekanbaru Triwulan III-2007.....	38
Grafik 3.1. Perkembangan Uang Kuasi, Giral dan SBI di Provinsi Riau	41
Grafik 3.2. Perkembangan Aset Perbankan Propinsi Riau	43
Grafik 3.3. Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Propinsi Riau	45
Grafik 3.4. Jumlah <i>Undisbursed Loans</i> Perbankan di Propinsi Riau	47
Grafik 3.5. Perkembangan NPLs Gross di Propinsi Riau	49
Grafik 3.6. Perkembangan LDR di Propinsi Riau	51
Grafik 3.7. Perkembangan Rasio Alat Likuid terhadap Non Core Deposit	57
Grafik 3.8. Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito	58
Grafik 3.9. Komposisi Pendapatan Bunga	59
Grafik 3.10. Komposisi Beban Bunga	60
Grafik 3.11. Perkembangan Laba Rugi	60
Grafik 4.1. Struktur Penduduk Provinsi Riau.....	65

Grafik 1.1.	Perkembangan PDRB Riau (% ,y-o-y).....	6
Grafik 1.2.	Struktur Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas (% ,y-o-y).....	13
Grafik 1.3.	Struktur Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas Triwulan (% ,y-o-y).....	16
Grafik 2.1.	Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru.....	33
Grafik 2.2.	Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru dan Nasional secara Bulanan.....	36
Grafik 2.3.	Inflasi kota Pekanbaru dan Nasional.....	36
Grafik 2.4.	Perkembangan Komponen-Komponen Inflasi.....	37
Grafik 2.5.	Disagregasi Inflasi di Kota Pekanbaru Triwulan III-2007.....	38
Grafik 3.1.	Perkembangan Uang Kuasi, Giral dan SBI di Provinsi Riau	41
Grafik 3.2.	Perkembangan Aset Perbankan Propinsi Riau	43
Grafik 3.3.	Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Propinsi Riau	45
Grafik 3.4.	Jumlah <i>Undisbursed Loans</i> Perbankan di Propinsi Riau	47
Grafik 3.5.	Perkembangan NPLs Gross di Propinsi Riau	49
Grafik 3.6.	Perkembangan LDR di Propinsi Riau	51
Grafik 3.7.	Perkembangan Rasio Alat Likuid terhadap Non Core Deposit	57
Grafik 3.8.	Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito	58
Grafik 3.9.	Komposisi Pendapatan Bunga	59
Grafik 3.10.	Komposisi Beban Bunga	60
Grafik 3.11.	Perkembangan Laba Rugi	60
Grafik 4.1.	Struktur Penduduk Provinsi Riau.....	65
Grafik 5.1.	Perkembangan Kas Inflow dan Outflow.....	71

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Gambaran Umum

Kondisi ekonomi makro nasional yang makin kondusif turut mendukung pemulihan ekonomi Riau

Kondisi ekonomi makro nasional yang cukup kondusif pada triwulan III-2007 memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian Riau. Perkembangan ekonomi terus membaik dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Seperti halnya pada triwulan sebelumnya, tingkat harga bergerak stabil dengan *trend* peningkatan yang masih dalam batas wajar terutama ketika memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Sikap optimisme masyarakat yang terus menguat terhadap kondisi ekonomi dan perkembangan harga ke depan semakin terlihat dari cukup tingginya nilai konsumsi yang terbentuk sehingga secara keseluruhan dapat mencerminkan naiknya daya beli (*puchasing power parity*).

Namun demikian, di tengah-tengah perkembangan yang baik serta sentimen yang positif, beberapa permasalahan ekonomi yang cukup krusial kembali muncul di pertengahan tahun 2007 ini, terkait dengan kendala distribusi barang terutama akibat bencana alam di beberapa daerah sentra produksi pertanian di Sumatera dan aksi spekulasi pedagang terhadap harga barang bahan makanan terutama sesaat menjelang bulan Ramadhan, sehingga memberikan tekanan yang cukup besar terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang akan berimplikasi luas terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Respon tingkat suku bunga bank mulai bergerak mengikuti penurunan suku bunga BI Rate

Di sektor perbankan, respon tingkat suku bunga bank mulai bergerak mengikuti penurunan suku bunga BI Rate. Penurunan BI Rate yang cukup signifikan menjadi 8,25% pada pertengahan 2007 diharapkan menjadi salah satu stimulan yang akan direspon oleh perbankan dengan menurunkan suku bunga kredit yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil. Bergeraknya sektor riil akan memacu kegiatan perekonomian yang memberi dampak ganda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.

2. Asesmen Makroekonomi Regional

Kinerja perekonomian Riau pada triwulan III-2007 dibanding dengan triwulan sebelumnya yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 8,51%. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan kinerja yang semakin baik bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,24%.

PDRB Riau triwulan III-2007 tumbuh 8,51%.

Tingginya pertumbuhan pada triwulan laporan didukung semua sektor ekonomi kecuali sektor pertanian dan sektor listrik, gas, dan air bersih hanya tumbuh tipis

Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2007 sebesar 8,51% tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan di hampir semua sektor ekonomi. Pertumbuhan yang cukup besar terjadi di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15,04%, diikuti oleh sektor bangunan sebesar 11,76%, sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan sebesar 11,27%, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,39%. Namun demikian sektor pertanian yang diharapkan dapat menjadi basis dalam industrialisasi sektor pertanian (*agrobusiness*), pada triwulan laporan justru menjadi pertumbuhan terendah yaitu sebesar 5,99%. Hal ini merupakan permasalahan serius yang harus cepat dicarikan solusinya. Karena berdasarkan data, 90% dari angkatan kerja nasional bergerak di sektor pertanian, sehingga upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sangat memerlukan dukungan dari industrialisasi di sektor pertanian tersebut. Begitu pula dengan sektor listrik, gas dan air bersih hanya tumbuh sebesar 6,03% dan sekaligus hal ini dapat merefleksikan adanya permasalahan mendasar di sektor ini. Apalagi dengan adanya rencana

pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim investasi dan industrialisasi di Riau dapat mengalami hambatan apabila permasalahan listrik dan infrastruktur lainnya tidak segera diatasi dengan cepat.

Sektor tersier mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder

Kondisi infrastruktur di Riau selama tahun 2007 ditandai dengan krisis yang terjadi pada pelayanan publik seperti listrik, air bersih dan jalan. Tahun 2006/2007 merupakan puncak krisis listrik yang sangat memberatkan masyarakat di Riau. Sepanjang tahun, proses pemadaman bergilir semakin intensif dengan jangka waktu yang semakin lama. (Dalam sehari ± 3 kali pemadaman dengan jangka waktu bervariasi). Begitu pula dengan kondisi jalan di propinsi yang kondisinya sangat memprihatinkan. Diperkirakan 30-40% jalan propinsi sudah mengalami kerusakan berat sehingga hal ini dapat mengurangi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan pengamatan terakhir, banyak hasil panen kelapa sawit rakyat yang akhirnya membusuk dan tidak dapat dijual akibat kondisi jalan yang rusak parah. Dengan demikian apabila permasalahan infrastruktur tersebut tidak diselesaikan pada akhirnya dapat menjadi masalah serius terutama dalam program pengentasan kemiskinan.

3. Asesmen Inflasi

Secara tahunan tekanan inflasi Riau cukup rendah mencapai 7,58% menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,75%

Perkembangan tingkat harga secara umum di Riau pada triwulan III-2007 terus bergerak membaik dan mencatat inflasi yang cukup rendah. Inflasi tahunan Riau (*year on year*) per September 2007 sebesar 7,58%, sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (per Juni 2007) sebesar 6,84%, terutama akibat adanya gejolak harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Namun secara keseluruhan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi tersebut masih menunjukkan *trend* penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan laju inflasi bulan September tahun 2006 sebesar 13,75%.

Secara triwulanan, inflasi Riau sebesar 1,92% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang justru mencatat deflasi sebesar -1,50%. Namun demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 2,27%. Terjadinya laju inflasi tersebut antara lain dipicu oleh adanya gangguan distribusi dan spekulasi terutama pada saat menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini diperkuat dari cukup tingginya angka inflasi yang berasal dari volatile food yaitu sebesar 2,87%, dan inflasi inti sebesar 2,65%. Kondisi ini sekaligus membuktikan bahwa tingginya permintaan uang tunai dari masyarakat di Riau ternyata cukup rentan dalam memicu laju inflasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah antisipasi, terutama pada saat tingginya indikator permintaan uang tunai di masyarakat.

4. Asesmen Keuangan Perbankan Riau

Indikator utama perbankan di Riau hingga triwulan III-2007 semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan dana pihak ketiga tumbuh 4,20%, sementara penyaluran kredit hanya tumbuh sebesar 3,96%. Tiga sektor utama penyerap kredit terbesar adalah sektor pertanian sebesar 21,79%, sektor perdagangan 20,44% dan sektor industri sebesar 11,40%. Tingginya tingkat penyerapan kredit di ketiga sektor tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sektor pertanian yang seharusnya menjadi basis ekonomi daerah, pertumbuhannya hanya mencapai sebesar 1,41%. Padahal di sektor itulah pelaku ekonomi dari golongan masyarakat menengah ke bawah banyak memberikan kontribusi.

Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan masih rendahnya angka Loan to Deposit Ratio (LDR) yang sampai dengan triwulan III-2007 hanya mencapai 51,71% atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 53,41%.

Namun satu prestasi yang patut disyukuri adalah dengan berhasil perbankan di Riau dalam menjaga kualitas aktiva produktif. Hal ini terlihat dari cukup rendahnya angka Non Performing Loans (NPLs) yang pada triwulan III-2007 hanya tercatat sebesar 4,19% atau jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,21%.

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

A. INFLASI DAN PDRB

INDIKATOR	2006		2007		
	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
MAKRO					
Indek Harga Konsumen :	147.05	151.99	157.57	155.22	158.20
Laju Inflasi Tahunan (yoy%) :	13.75%	6.32%	9.42%	6.84%	7.58%
PDRB - harga konstan (miliar Rp)					
- Pertanian	3,582.27	3,620.82	3,561.98	3,657.73	3,796.72
- Pertambangan & Penganliran	11,333.14	11,357.30	11,492.09	11,536.76	11,589.15
- Industri Pengolahan	2,169.04	2,198.03	2,205.60	2,219.64	2,325.09
- Listrik, gas dan Air Besih	44.55	44.64	44.83	45.57	47.23
- Bangunan	607.23	619.41	621.57	644.63	678.67
- Perdagangan, Hotel, dan restoran	1,589.12	1,602.51	1,656.94	1,702.71	1,754.26
- Pengangkutan dan Komunikasi	553.04	565.01	568.79	579.45	601.00
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa	228.69	239.74	234.66	233.94	254.47
- Jasa	931.42	955.63	955.17	967.74	1,017.35
Pertumbuhan PDRB (yoy %, dengan migas)	5.44%	5.69%	4.46%	4.29%	4.87%
Pertumbuhan PDRB (yoy %, tanpa migas)	9.59%	10.40%	7.41%	7.24%	8.51%
Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	3,131.55	4,496.34	1,087.70	2,558.14	3,409.46
Volume Ekspor Non Migas (ribu ton)	9,335.95	12,865.04	2,665.21	5,703.09	8,480.77
Nilai Impor Non Migas (USD Juta)	510.16	1,103.47	527.21	835.55	1,162.83
Volume Impor Non Migas (ribu ton)	872.06	1,460.34	374.7	855.9	1,142.49

B. PERBANKAN

INDIKATOR	2006		2007		
	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
PERBANKAN					
Bank Umum :					
Total Aset (Rp Triliun)	28.53	31.83	30.51	31.64	33.60
DPK (Rp Triliun)	24.26	27.65	26.18	27.28	29.29
- Giro (Rp Triliun)	10.33	12.17	11.17	11.00	12.26
- Tabungan (Rp Triliun)	7.30	9.16	8.63	9.12	9.81
- Deposito (Rp Triliun)	6.63	6.32	6.39	7.15	7.21
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek	19.13	21.90	20.10	22.03	23.37
LDR	78.86%	79.19%	76.77%	80.78%	79.79%
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi kantor cab.	13.30	13.85	14.00	14.57	15.14
- Modal Kerja	4.50	4.92	4.97	5.08	5.14
- Konsumsi	4.90	4.81	4.77	4.85	5.07
- Investasi	3.91	4.13	4.27	4.64	4.93
- LDR	54.84%	50.10%	53.49%	53.41%	51.71%
Kredit UMKM (triliun Rp)					
- Kredit Modal Kerja	3.02	3.14	3.17	3.50	3.54
- Kredit Investasi	1.42	1.48	1.60	1.92	1.99
- Kredit Konsumsi	3.96	4.12	4.26	4.63	4.92
Total kredit MKM (triliun Rp)	8.40	8.73	9.04	10.04	10.45
NPL MKM Nominal	-	0.26	0.30	0.37	0.35
NPL MKM (%)	0.00%	2.92%	3.28%	3.67%	3.39%
BPR					
Total Aset (Rp miliar)	280.12	277.69	300.16	319.09	347.78
DPK (Rp Miliar)	184.38	187.43	201.19	211.86	238.80
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek	166.55	168.74	184.46	199.30	200.00
Kredit UMKM (Triliun Rp)	166.55	168.74	184.46	199.30	200.00
Rasio NPL (%)	9.08	7.16	7.93	8.49	6.91
LDR	90.33	90.02	91.68	94.07	83.75

Bab 1

KONDISI EKONOMI

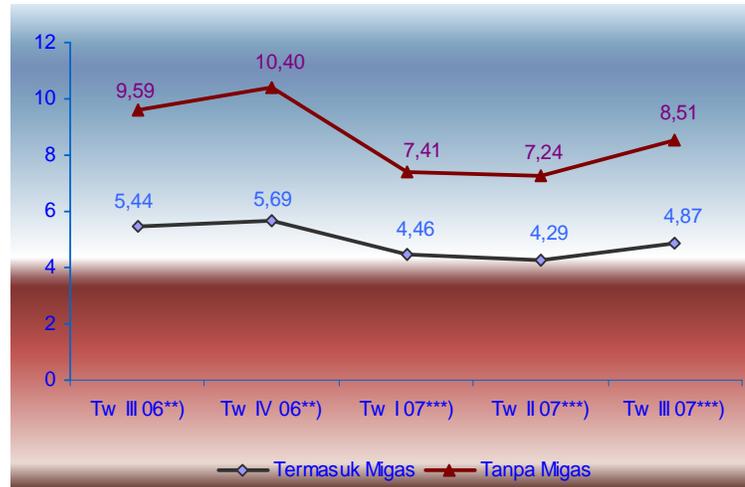
MAKRO REGIONAL

I. Pertumbuhan PDRB

1. Kondisi Umum

Memasuki triwulan III-2007, perekonomian Riau terus mengalami penguatan. Sumber penguatan tersebut ditopang oleh ekspor, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Dalam triwulan laporan, laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 8,51%, melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 yang mencapai 9,59%, namun meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 7,24%. Sementara itu, dengan memperhitungkan migas pertumbuhan ekonomi Riau tercatat sebesar 4,87%, juga melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 yaitu sebesar 5,44%, namun juga masih lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,29%.

Grafik I.1. Perkembangan PDRB Riau (% ,y-o-y)



Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah
 Keterangan : ***) angka sangat sementara
 **) angka sementara

2. PDRB dari Sisi Permintaan

2.1. PDRB Tanpa Migas

Dalam triwulan laporan, laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai 8,51%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II–2007.

Tabel I.1. Pertumbuhan PDRB Riau Tanpa Migas Menurut Penggunaan (% ,y-o-y)

No.	Komponen	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	8,23	7,93	7,71	7,56	7,59
	a. Makanan	8,24	8,06	6,59	6,41	6,36
	b. Non Makanan	8,23	7,87	8,30	8,17	8,23
2	Konsumsi Lembaga Swasta	12,18	11,22	10,22	9,13	7,14
3	Konsumsi Pemerintah	11,69	12,06	9,11	8,67	9,64
4	FMTB	9,21	9,34	10,17	8,06	9,03
5	Perubahan Stock	-52,76	-39,09	-1,55	-35,65	-51,51
6	Ekspor	11,47	8,92	6,67	7,47	9,63
	a. Antar Negara	11,86	9,30	6,66	7,49	9,89
	b. Antar Daerah	8,59	6,13	6,71	7,30	7,70
7	Impor	14,22	10,62	8,99	9,75	10,56
	a. Antar Negara	11,60	8,72	5,25	9,25	11,48
	b. Antar Daerah	16,06	11,95	11,56	10,09	9,94
	Total	9,59	10,40	7,41	7,24	8,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah
 Keterangan : ***) angka sangat sementara
 **) angka sementara

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen impor yaitu sebesar 10,56%, terutama karena meningkatnya komponen barang modal (mesin-mesin pabrik, kendaraan bermotor) dan bahan baku untuk proses produksi (bahan kertas dan pupuk)

Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 9,64%, sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah untuk pembelian barang dan inventaris, peningkatan pengeluaran belanja pegawai seperti gaji, dan pembiayaan penyusutan barang modal atas pemakaian barang modal.

Pertumbuhan ekspor mencapai 9,63% atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya ekspor beberapa komoditas andalan seperti industri kertas dan bubur kertas, industri CPO, dan industri makanan, serta beberapa komoditas perikanan, dan perkebunan.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan sebesar 9,03% yang didorong oleh maraknya pembangunan tempat dan bangunan bukan tempat tinggal tinggal (*property* dan *residential*), serta pemakaian mesin-mesin baru atau perbaikan mesin-mesin dan penggunaan kendaraan bermotor oleh perusahaan swasta maupun pemerintah. Pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, pembukaan lahan baru, peremajaan tanaman perkebunan, dan hutan tanaman industri juga menjadi pemicu pada pertumbuhan komponen PMTB tersebut.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 7,59%. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat seperti pegawai negeri, pegawai swasta, petani perkebunan dan perikanan, serta persiapan perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba yakni sebesar 7,14%. Pertumbuhan pada komponen ini diperkirakan didorong oleh beberapa kegiatan bernuansa adat dan kebudayaan melayu serta kegiatan sosial yang melibatkan organisasi sosial dan kemasyarakatan di berbagai kabupaten/kota.

Dilihat dari struktur PDRB ekonomi Riau tanpa migas dari sisi penggunaan, komponen konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu mencapai 48,26% terhadap PDRB Riau. Selanjutnya komponen ekspor dan impor memberikan kontribusi masing-masing sebesar 42,68% dan 28,94% terhadap PDRB Riau.

Komponen PMTB memberikan kontribusi sebesar 19,51% atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Riau, karena komponen PMTB sangat terkait dengan investasi, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta.

Sementara kontribusi konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga swasta nirlaba masing-masing sebesar 13,75% dan 0,48%. Kontribusi konsumsi pemerintah meningkat baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 maupun dengan triwulan sebelumnya. Hal ini terkait dengan meningkatnya total APBD Pemprov dan kabupaten/kota pada tahun 2007 dan meningkatnya realisasi APBD pada triwulan III-2007.

Tabel 1.2. Struktur Komponen Penggunaan Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (% ,y-o-y)

No.	Komponen	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	49,69	50,80	48,77	48,41	48,26
	a. Makanan	17,23	17,45	16,48	16,80	16,34
	b. Non Makanan	32,45	33,34	32,29	31,61	31,92
2	Konsumsi Lembaga Swasta	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48
3	Konsumsi Pemerintah	12,40	12,89	12,32	12,00	13,75
4	PMTB	20,21	21,49	20,48	19,01	19,51
5	Perubahan Stock	3,91	1,54	4,03	4,40	4,25
6	Ekspor	45,37	44,10	42,26	45,20	42,68
	a. Antar Negara	42,39	41,22	39,47	42,12	39,83
	b. Antar Daerah	2,98	2,89	2,79	3,08	2,85
7	Impor	32,08	31,32	28,37	29,49	28,94
	a. Antar Negara	13,90	13,54	12,25	12,40	12,53
	b. Antar Daerah	18,18	17,78	16,12	17,09	16,41
Total		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah
 Keterangan : **) angka sementara
 ***) angka sementara

2.2. PDRB dengan Migas

Laju pertumbuhan ekonomi Riau dengan memasukkan unsur migas tercatat sebesar 4,87% lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2007. Dengan memasukkan migas maka pertumbuhan beberapa komponen mengalami perubahan, karena kontribusi yang dimiliki oleh komponen migas dalam perekonomian Provinsi Riau cukup besar.

Tabel 1.3. Pertumbuhan PDRB Riau Dengan Migas Menurut Penggunaan (% , y-o-y)

No.	Komponen	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	8,23	7,93	7,71	7,56	7,59
	a. Makanan	8,24	8,06	6,59	6,41	6,36
	b. Non Makanan	8,23	7,87	8,30	8,17	8,23
2	Konsumsi Lembaga Swasta	12,18	11,22	10,22	9,13	7,14
3	Konsumsi Pemerintah	11,69	12,06	9,11	8,67	9,64
4	PMTB	4,40	4,69	5,46	5,29	5,81
5	Perubahan Stock	23,86	34,90	-0,40	-11,68	-16,92
6	Ekspor	4,10	3,06	4,27	4,91	6,38
	a. Antar Negara	4,00	3,00	4,29	4,97	6,47
	b. Antar Daerah	5,82	4,03	3,87	3,92	4,73
7	Impor	10,00	7,97	8,56	7,51	7,86
	a. Antar Negara	3,20	3,36	4,41	4,28	5,33
	b. Antar Daerah	15,71	11,67	11,72	9,94	9,75
	Total	5,44	5,69	4,46	4,29	4,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : ***) angka sangat sementara
**) angka sementara

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan migas tumbuh sebesar 5,81%, lebih tinggi baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 maupun dengan triwulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan investasi di bidang migas baik untuk pemeliharaan peralatan dan infrastrukturnya maupun untuk pencarian sumur-sumur produksi baru.

Dilihat dari struktur PDRB Propinsi Riau dengan migas menurut sisi penggunaan, komponen ekspor memberikan kontribusi tertinggi yaitu mencapai 53,64%. Sedangkan kontribusi komponen impor sebesar 17,57%. Dengan kondisi tersebut kontribusi ekspor *netto* mencapai sebesar 36,04% yang menunjukkan bahwa peran migas di Riau masih sangat dominan. Secara nasional produksi migas Provinsi Riau mencapai 50,33% dari produk migas nasional.

Sementara itu, komponen PMTB memberikan kontribusi sebesar 23,77% yang menunjukkan peran kegiatan investasi fisik dari seluruh aktivitas ekonomi masih relatif besar. Besarnya potensi sumber daya alam di provinsi Riau merupakan salah satu faktor penting dalam menarik minat para investor untuk berinvestasi.

Tabel 1.4. Struktur Komponen Penggunaan Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (% ,y-o-y)

No.	Komponen	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	28,20	28,49	27,77	27,89	27,68
	a. Makanan	9,78	9,79	9,38	9,68	9,37
	b. Non Makanan	18,42	18,70	18,38	18,22	18,31
2	Konsumsi Lembaga Swasta	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28
3	Konsumsi Pemerintah	7,04	7,23	7,01	6,91	7,89
4	PMTB	23,27	23,27	22,48	22,17	23,77
5	Perubahan Stock	5,59	5,84	4,86	4,53	4,31
6	Ekspor	54,58	53,11	54,92	55,66	53,64
	a. Antar Negara	52,05	50,69	52,55	53,28	51,20
	b. Antar Daerah	2,53	2,42	2,37	2,39	2,44
7	Impor	18,97	18,22	17,32	17,45	17,57
	a. Antar Negara	8,63	8,24	8,11	8,01	8,02
	b. Antar Daerah	10,33	9,99	9,21	9,44	9,55
	Total	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : ***) angka sangat sementara
**) angka sementara

3. PDRB dari Sisi Penawaran

3.1. PDRB Tanpa Migas

Pertumbuhan ekonomi pada sektor bangunan yaitu mencapai 11,76% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 dan triwulan sebelumnya. Adanya pembangunan perumahan, ruko, gedung perkantoran, jalan, jembatan, dan bangunan lainnya yang meningkat cukup signifikan serta perbaikan sarana dan prasarana fisik yang dilakukan pemerintah turut andil dalam pertumbuhan sektor ini.

Selanjutnya, sektor keuangan (keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan) tumbuh sebesar 11,27% yang diperkirakan masih didorong oleh penyaluran kredit, khususnya kredit konsumsi. Selain itu, perkembangan perekonomian dan pembangunan yang relatif cepat di Riau telah berdampak pada berdirinya jasa penunjang keuangan seperti usaha perantara sekuritas, lembaga perkreditan rakyat dan koperasi, jasa perusahaan baru seperti jasa hukum dan advokasi, jasa akuntansi, dan jasa konsultasi konstruksi, dan jasa penyewaan bangunan seperti jasa sewa rumah dan sewa ruko.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh 10,39% yang didorong oleh peningkatan pertumbuhan pada semua subsektor pendukungnya. Konsumsi masyarakat menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri menyebabkan terjadinya peningkatan yang cukup besar pada subsektor perdagangan baik pada retail besar maupun pasar tradisional (retail

kecil). Pertumbuhan subsektor perdagangan mencapai 10,41% lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2007. Peningkatan pada sub sektor perhotelan didukung oleh banyaknya pelatihan-pelatihan dan seminar yang diadakan oleh instansi swasta maupun pemerintah serta adanya beberapa *event* nasional yang diselenggarakan di Provinsi Riau. Sementara itu, pola konsumsi masyarakat Riau di luar rumah dan adanya beberapa kegiatan di atas turut meningkatkan nilai tambah di subsektor restoran.

Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 9,68%, yang didukung oleh pertumbuhan industri makanan dan minuman, industri kelapa sawit, industri *pulp and paper*, industri garmen serta industri mebel. Sementara itu sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 9,23%. Pertumbuhan subsektor jasa pemerintahan berasal dari pengeluaran untuk upah/gaji, insentif, dan penyusutan barang modal dari aset pemerintah. Sementara sektor jasa swasta berasal pertumbuhan jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga.

Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi tercatat sebesar 8,67%. Peningkatan ini dipicu oleh peningkatan pemakaian pulsa oleh pengguna telepon seluler karena semakin mudah dan murah akses serta harga yang ditawarkan oleh para *provider* dan peningkatan jumlah penumpang terutama menjelang liburan dan keperluan dinas maupun bisnis.

Sektor listrik dan air bersih mengalami pertumbuhan sebesar 6,03%. Pertumbuhan subsektor listrik tergolong cukup tinggi namun masih terbatasnya persediaan daya di Riau untuk mencukupi kebutuhan listrik untuk rumah tangga maupun industri masih menjadi masalah utama, selain itu besarnya beban biaya operasional penyaluran listrik mengakibatkan sektor ini belum bisa berkembang optimal. Sementara itu, masih kurangnya minat masyarakat untuk memakai air dari perusahaan air minum karena masih rendahnya kualitas air yang dihasilkan perusahaan air minum tersebut, menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan subsektor air bersih.

Sektor pertanian mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 5,99%, dengan pertumbuhan subsektor tertinggi pada subsektor perkebunan dan subsektor perikanan yaitu 9,91% dan 8,18%. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada subsektor perkebunan disebabkan adanya peningkatan produksi kelapa sawit, karet, dan kelapa. Sementara itu, naiknya harga-harga pada hasil peternakan terutama produk daging, telur, dan ayam membuat masyarakat

mengantisipasi dengan mengkonsumsi ikan yang harganya relatif stabil dan produksinya melimpah.

Secara umum kegiatan ekonomi Riau pada triwulan III-2007 menunjukkan trend peningkatan dibandingkan dengan triwulan I dan triwulan II tahun 2007, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 diperkirakan akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2006.

Tabel 1.5. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas (%y-o-y)

No.	Komponen	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)
1	Pertanian	6,88	7,51	4,27	4,99	5,99
2	Pertambangan dan Penggalian	34,51	37,67	25,28	14,56	15,04
3	Industri Pengolahan	10,60	11,93	9,52	8,28	9,68
4	Listrik dan Air Bersih	6,68	6,25	4,93	5,26	6,03
5	Bangunan	8,98	10,64	8,20	8,41	11,76
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,43	11,54	8,69	8,97	10,39
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10,33	11,00	9,19	8,41	8,67
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	16,41	20,61	11,83	9,03	11,27
9	Jasa-jasa	11,01	11,24	9,04	8,39	9,23
PDRB Tanpa Migas		9,59	10,40	7,41	7,24	8,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

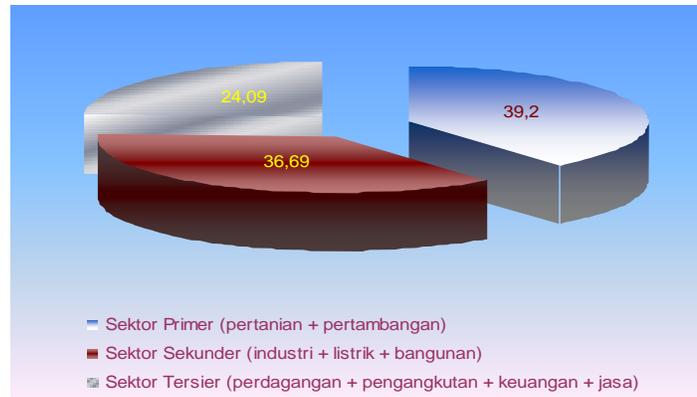
Keterangan : ***) angka sangat sementara
**) angka sementara

Bila dilihat dari distribusinya, masih didominasi oleh sektor primer yaitu sekitar 39,2% terhadap perekonomian Riau, dimana 37,42% peranan sektor ini utamanya disumbang oleh sektor pertanian yang diperkirakan berasal dari subsektor perkebunan karena peningkatan produksi komoditas kelapa sawit yang telah banyak mendorong nilai tambah subsektor ini. Selain kelapa sawit, komoditas karet dan kelapa yang memiliki area perkebunan cukup luas dan produksinya relatif baik juga memberikan kontribusi yang cukup berarti. Selanjutnya, subsektor kehutanan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Riau, walaupun pertumbuhannya kecil. Peningkatan harga komoditas kayu telah mendorong peningkatan nilai tambah subsektor kehutanan.

Selanjutnya sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 30,33%, peran yang besar pada sektor ini terutama ditopang oleh peran industri kertas dan barang dari kertas, serta industri makanan, minuman dan tembakau. Permintaan yang cukup tinggi akan

komoditas kertas, bahan dari kertas serta CPO (Crude Palm Oil) di pasaran internasional telah meningkatkan produksi komoditas ini. Selain itu mulai berkembangnya industri-industri kecil seperti industri garmen dan mebel di Riau, juga sedikitnya mampu meningkatkan nilai tambah sektor industri.

Grafik 1.2. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas (% y-o-y)



Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah
 Keterangan : (***) angka sangat sementara
 **) angka sementara

Sementara kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran tercatat sebesar 11,82%. Meningkatnya transaksi jual beli di wilayah Riau, serta ditunjang oleh daya beli masyarakat Riau yang relatif stabil (terutama untuk pembelian produk tahan lama seperti kendaraan bermotor roda dua dan empat, barang elektronik seperti TV, radio, komputer, telepon genggam) menjadikan sektor perdagangan di daerah Riau menjadi berkembang pesat terutama di wilayah perkotaan.

Selain sektor-sektor tersebut, sektor jasa-jasa juga telah menunjukkan perkembangan yang baik, dengan memberikan kontribusi sebesar 5,70%. Kontribusi ini terutama dihasilkan dari penciptaan nilai tambah khususnya berupa upah/gaji, insentif dan penyusutan barang modal yang relatif membaik.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi 3,45%. Tumbuhnya jasa penyewaan bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal seperti untuk perkantoran dan usaha, ditambah dengan munculnya bank-bank baru, baik yang konvensional maupun syariah, dan lembaga keuangan lain seperti asuransi telah mendorong perkembangan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi peningkatan di sektor angkutan dan komunikasi memiliki kontribusi 3,13% yang didorong oleh meningkatnya sarana transportasi dan komunikasi seperti bertambahnya armada dan penumpang angkutan darat, laut, dan udara serta peningkatan jaringan telepon terutama telepon seluler di daerah. Peningkatan ketiga subsektor ini diharapkan dapat menjadi penunjang sektor ekonomi lainnya dan diharapkan kontribusinya akan terus mengalami peningkatan.

Kontribusi terendah pada triwulan III-2007 terjadi pada sektor listrik dan air bersih yaitu 0,33%. Pengelolaan listrik dan air bersih yang belum optimal menjadikan kontribusi sektor ini masih relatif kecil. Pembangunan PLTD baru di Riau diharapkan akan dapat meningkatkan peranan subsektor ini pada triwulan mendatang. Hal yang sama diharapkan juga bisa terjadi pada subsektor air bersih, dimana saat ini sedang dilakukan pembangunan PDAM bekerjasama dengan investor dari Belanda.

Tabel 1.6. Struktur Sektor Ekonomi Tanpa Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau (%.y-o-y)

No.	Komponen	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)
1	Pertanian	38,49	38,03	38,64	37,60	37,42
2	Pertambangan dan Penggalian	1,50	1,57	1,45	1,59	1,80
3	Industri Pengolahan	30,60	29,75	30,55	31,98	30,33
4	Listrik dan Air Bersih	0,35	0,36	0,34	0,33	0,33
5	Bangunan	4,49	4,86	4,32	4,46	6,04
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,74	12,40	11,93	11,56	11,82
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,33	3,47	3,28	3,18	3,13
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	3,29	3,35	3,56	3,43	3,45
9	Jasa-jasa	6,20	6,21	5,93	5,87	5,70
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : ***) angka sangat sementara
**) angka sementara

3.1. PDRB dengan Migas

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Riau dengan memasukkan unsur migas mengalami perubahan yang cukup signifikan pada 2 sektor yaitu sektor pertambangan (pertambangan dan penggalian) dan sektor industri pengolahan yang masing-masing tumbuh sebesar 2,26% dan 7,19%.

Industri pengolahan di Riau mengalami pertumbuhan 7,19%, yang ditopang oleh pertumbuhan industri non migas, sementara industri migas hanya tumbuh 0,32%. Sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu 2,26%. Mulai menipisnya persediaan minyak serta belum maksimalnya kapasitas produksi pertambangan migas yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan tersendatnya pasokan produksi kilang minyak di Dumai menjadi penyebab menurunnya kegiatan migas di Riau selama tahun 2007.

Tabel 1.7. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas (%y-o-y)

No.	Komponen	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)
1	Pertanian	6,88	7,51	4,27	4,99	5,99
2	Pertambangan dan Penggalian	2,68	2,53	2,50	2,27	2,26
3	Industri Pengolahan	8,27	9,35	7,43	6,09	7,19
4	Listrik dan Air Bersih	6,68	6,25	4,93	5,26	6,03
5	Bangunan	8,98	10,64	8,20	8,41	11,76
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,43	11,54	8,69	8,97	10,39
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10,33	11,00	9,19	8,41	8,67
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	16,41	20,61	11,83	9,03	11,27
9	Jasa-jasa	11,01	11,24	9,04	8,39	9,23
PDRB dengan Migas		5,44	5,69	4,46	4,29	4,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : **) angka sangat sementara
 ***) angka sementara

Dilihat dari struktur perekonomian Riau dengan memasukan unsur migas, maka sektor pertambangan dan penggalian masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 41,98%, dengan didominasi oleh peranan sub sektor pertambangan migas yaitu mencapai 41,32%. Selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian sebesar 21,46% yang didominasi oleh subsektor perkebunan yang mencapai 11,33%. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 6,78%, sektor jasa-jasa sebesar 3,27%, sektor bangunan sebesar 3,46%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,98%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,79%, dan kontribusi terendah diberikan oleh sektor listrik & air bersih yaitu sebesar 0,19%.

Tabel 1.8. Struktur Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas (%y-o-y)

No.	Komponen	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)	Tw II 07***)	Tw III 07***)
1	Pertanian	21,85	21,33	22,00	21,67	21,46
2	Pertambangan dan Penggalian	42,26	43,03	42,15	41,48	41,98
3	Industri Pengolahan	19,20	18,45	19,14	20,24	19,09
4	Listrik dan Air Bersih	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19
5	Bangunan	2,55	2,72	2,46	2,57	3,46
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,66	6,95	6,79	6,66	6,78
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1,89	1,94	1,87	1,83	1,79
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	1,87	1,88	2,03	1,98	1,98
9	Jasa-jasa	3,52	3,48	3,37	3,38	3,27
Total		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : ***) angka sangat sementara

**) angka sementara

Dilihat dari aktifitas ekonomi, sektor primer yang terdiri dari pertanian dan pertambangan memberikan kontribusi hingga 63,4%. Selanjutnya, sektor sekunder yaitu industri, listrik dan bangunan sebesar 22,7%. Sementara sektor tersier yang terdiri dari perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa hanya memberikan sumbangan sebesar 13,8%.

Grafik 1.3. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas Triwulan (% , y-o-y)



Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau, diolah

Keterangan : ***) angka sangat sementara

**) angka sementara

Melihat besarnya peranan sektor-sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Riau, maka diperlukan kebijakan Pemrov dan pemkab/kota terhadap pengembangan sektor-sektor tersebut. Maka untuk mengoptimalkan pembangunan masing-masing sektor diperlukan adanya infrastruktur (listrik, jalan, jembatan, dll), dan pengembangan industri hilir untuk meningkatkan *value added* (nilai tambah) serta menciptakan lapangan kerja sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.

II. Keuangan Daerah

1. Kondisi Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau tahun 2007 mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran tahun 2006. Anggaran pendapatan meningkat sebesar Rp.0,47 triliun atau 14,88% menjadi 3,65 triliun, sedangkan anggaran belanja naik sebesar 0,52 triliun atau 14,11% menjadi 4,19 triliun sehingga secara keseluruhan terdapat defisit anggaran sebesar 0,54 triliun yang dibiayai dengan menggunakan sisa anggaran tahun sebelumnya. Namun, pada bulan Oktober 2007, telah dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P), sehingga terjadi peningkatan sebesar 38,13% dari jumlah APBD sebelumnya.

2. Realisasi APBD Propinsi Riau Tahun 2007

Sampai dengan semester I tahun 2007, anggaran pendapatan daerah Propinsi Riau telah terealisasi sebesar Rp.1.15 triliun atau 31,41% dari total anggaran pendapatan daerah yaitu sebesar Rp.3.65 triliun. Realisasi anggaran pendapatan dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.588,61 miliar (59,44%), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) sebesar Rp.556.82 miliar (20,96%). Sementara Belanja Pemerintah Daerah telah terealisasi sebesar Rp.0,47 triliun atau 11,22% dari total anggaran keseluruhan yaitu sebesar Rp.4,19 triliun. Secara umum ringkasan APBD Propinsi Riau semester I tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 1.9. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau semester I-2007

Tabel 1.9. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Semester I-2007

(Rp Juta)

Komposisi APBD Riau	Anggaran 2007	Realisasi s/d. Sem I 2007
I. PENDAPATAN DAERAH	3.646.197,12	1.145.422,69
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	990.224,11	588.605,97
- Pajak Daerah	822.675,50	401.987,80
- Retribusi Daerah	31.571,71	19.083,84
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	48.714,29	-
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	87.262,61	167.534,33
2. PENDAPATAN TRANSFER	2.655.973,01	556.816,72
- Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan	2.635.973,01	556.816,72
- Dana bagi hasil pajak	274.165,68	41.057,09
- Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	2.084.148,33	376.930,13
- Dana Alokasi Umum	277.659,00	138.829,50
3. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	20.000,00	-
- Dana Penyesuaian	20.000,00	-
II. BELANJA DAERAH	4.187.692,06	469.910,78
1. BELANJA OPERASI	2.369.445,29	398.955,25
- Belanja Pegawai	952.615,45	236.429,39
- Belanja Barang	742.429,86	74.872,98
- Belanja Bantuan Sosial	312.270,29	86.152,89
- Belanja Bantuan Keuangan	362.129,69	1.500,00
2. BELANJA MODAL	1.808.246,77	70.777,07
- Belanja Tanah	82.361,55	-
- Belanja Peralatan dan Mesin	344.940,06	433,61
- Belanja Gedung dan Bangunan	461.123,93	26.487,42
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	795.750,96	43.279,34
- Belanja aset tetap lainnya	90.397,21	87,26
- Belanja aset lainnya	33.673,06	489,44
2. BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000,00	178,46
- Belanja Tidak Terduga	10.000,00	178,46
Surplus/Defisit	(541.494,94)	675.511,91
III. PEMBIAYAAN DAERAH	593.253,24	0,00
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	799.489,37	0,00
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	799.489,37	0,00
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	206.236,13	0,00
- Pembentukan Dana Cadangan	100.000,00	0,00
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	67.090,00	0,00
- Pembayaran Pokok Utang	39.146,13	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	593.253,24	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	51.758,30	675.511,92

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

Dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah, realisasi belanja terbesar terdapat pada bidang Pemerintahan Umum yaitu sebesar Rp.181.522,33 juta sedangkan realisasi anggaran belanja terendah terdapat pada Dinas Transmigrasi dan Kependudukan sebesar Rp.531.68 juta. (lihat tabel 1.10.)

Tabel 1.10. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi s/d Triwulan II - 2007

(Rp Juta)

NO.	Uraian	Anggaran Pendapatan	Realisasi	%	Anggaran Belanja	Realisasi	%
I	URUSAN WAJIB	3.645.486,81	1.145.062,73	31,41	3.752.900,82	412.801,34	11,00
1	PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	543.628,41	32.044,65	5,89
	- Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	512.035,20	27.135,68	5,30
	- Badan Perpustakaan dan Arsip	0,00	0,00	0,00	31.593,21	4.908,97	15,54
2	KESEHATAN	30.733,31	18.674,70	60,76	232.851,79	33.936,64	14,57
	- Dinas Kesehatan	517,50	229,90	44,43	94.374,61	8.794,41	9,32
	- Rumah Sakit Umum Daerah	28.026,13	16.008,23	57,12	119.255,08	19.618,99	16,45
	- Rumah Sakit Jawa	2.189,68	2.436,57	111,28	19.222,10	5.523,24	28,73
3	Dns. Pemukiman & Prasarana Wil. (PU)	525,00	256,90	48,93	919.872,83	53.159,36	5,78
4	Dns. Pemukiman & Prasarana Wilayah	0,00	0,00	0,00	29.822,62	0,00	0,00
5	Dns. Pemukiman & Prasarana Wilayah	0,00	0,00	0,00	684,70	0,00	0,00
6	Bdn. Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	35.478,35	7.641,07	21,54
7	Dinas Perhubungan	1.852,10	861,79	46,53	107.525,67	34.179,45	31,79
8	Bdn. Pngen. Dampak Lingkungan	0,00	0,00	0,00	16.228,61	3.968,84	24,46
9	Dns. Transmigrasi dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00	29.630,00	531,68	1,79
10	Bdn. Pemberdayaan dan Perlind. Masy.	0,00	0,00	0,00	7.818,08	378,02	4,84
11	Bdn. Kesejahteraan Sosial	0,00	0,00	0,00	30.874,61	6.434,04	20,84
12	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	54.599,46	7.669,13	14,05
13	Dns. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	0,00	18.785,58	5.108,53	27,19
14	Bdn. Promosi dan Investasi	0,00	0,00	0,00	22.680,88	6.649,16	29,32
15	Dns. Kebudayaan, Kes. dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	106.822,83	12.720,00	11,91
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	133.956,52	2.410,93	1,80
17	Kesatuan Bangsa dan Politik Dlm. Negeri	0,00	0,00	0,00	22.960,25	5.799,77	25,26
	- Bdn. Inf. Kom. Kesatuan Bangsa	0,00	0,00	0,00	2.559,67	619,72	24,21
	- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	18.642,25	5.101,16	27,36
	- Bdn. Pember. dan Perlind. Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.758,33	78,89	4,49
18	Pemerintah Umum	3.612.376,40	1.125.269,34	31,15	1.357.229,40	181.522,33	13,37
	- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	19.809,83	5.262,41	26,56
	- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	1.575,34	434,59	27,59
	- Sekretariat Daerah	2.790.195,90	723.522,45	25,93	1.101.311,93	119.188,00	10,82
	- Sekretariat DFRD	0,00	0,00	0,00	75.794,27	21.514,09	28,38
	- Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	27.254,95	4.474,67	16,42
	- Badan Pengawasan Daerah	0,00	0,00	0,00	12.997,14	2.987,25	22,98
	- Kantor Penghubung Pemerintah	30,00	15,99	53,30	13.791,51	3.612,98	26,20
	- Dinas Pendapatan	822.150,50	401.730,90	48,86	104.694,43	24.048,34	22,97
19	Badan Administrasi dan Diklat Pegawai	0,00	0,00	0,00	32.014,63	6.742,61	21,06
20	Bdn. Pemberd. dan Perlind. Masyarakat	0,00	0,00	0,00	21.588,22	4.335,18	20,08
21	Bd. Perpustakaan dan Arsip	0,00	0,00	0,00	1.550,72	517,73	33,39
22	Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	26.296,66	7.052,22	26,82
	- Bdn. Infor. Kom dan Kesatuan Bangsa	0,00	0,00	0,00	14.318,08	4.708,87	32,89
	- Bdn. Pengolahan Data Elektronik	0,00	0,00	0,00	11.978,58	2.343,35	19,56
II	URUSAN PILIHAN	710,30	359,97	50,68	434.791,24	57.109,44	13,13
1	Pertanian	92,00	8,80	9,57	238.081,95	21.926,81	9,21
	- Dinas Tanaman Pangan	92,00	8,80	9,57	71.488,64	9.405,29	13,16
	- Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00	108.012,41	5.705,44	5,28
	- Dinas Peternakan	0,00	0,00	0,00	39.602,35	2.794,36	7,06
	- Badan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	18.978,55	4.021,72	21,19
2	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	45.341,11	7.104,51	15,67
3	Dns. Pertambangan dan Energi	0,00	0,00	0,00	38.468,16	5.739,21	14,92
4	Dns. Kebudayaan, Kes. Dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	10.946,68	840,99	7,68
5	Dns. Perikanan dan Kelautan	46,30	62,02	133,95	46.968,18	6.995,05	14,89
6	Dns. Perindustrian dan Perdagangan	572,00	289,15	50,55	20.299,55	6.756,30	33,28
7	Dns. Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	13.330,54	1.508,47	11,32
8	Dns. Transmigrasi dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00	21.355,07	6.238,10	29,21
JUMLAH		3.646.197,11	1.145.422,70	31,41	4.187.692,06	469.910,78	11,22
III.		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			51.758,30	675.511,92	

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (APBD-P)

Tabel 1.11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P)

(Rp Juta)

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
I. PENDAPATAN DAERAH	3.646.197,11	3.566.800,47	(79.396,64)	-2,18
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	990.224,11	1.104.032,32	113.808,21	11,49
- Pajak Daerah	822.150,50	849.150,50	27.000,00	3,28
- Retribusi Daerah	32.096,71	34.459,38	2.362,67	7,36
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	48.714,29	108.836,92	60.122,63	123,42
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	87.262,61	111.585,52	24.322,91	27,87
2. DANA PERIMBANGAN	2.635.973,00	2.442.768,15	(193.204,85)	-7,33
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.358.314,00	2.165.109,15	(193.204,85)	-8,19
- Dana Alokasi Umum	277.659,00	277.659,00	0,00	0,00
- Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
- Dana Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
- DBH Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bantuan Keuangan dari Prop. atau Pemda. Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
II. BELANJA DAERAH	4.187.692,05	4.386.257,07	198.565,02	4,74
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.184.484,99	1.372.640,07	188.155,08	15,88
- Belanja Pegawai	500.085,01	508.058,10	7.973,09	1,59
- Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Bantuan Sosial	312.270,29	447.830,79	135.560,50	43,41
- Belanja Bagi Hsl Kpd. Prop./Kab./Kota & Pemerintahan Desa	325.479,69	370.101,18	44.621,49	13,71
- Belanja Bant.Keu. kpd. Prop./Kab./Kota & Pemerintahan Desa	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00
- Belanja Tidak Terduga	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2. BELANJA LANGSUNG	3.003.207,06	3.013.617,00	10.409,94	0,35
- Belanja Pegawai	495.971,33	474.681,21	(21.290,12)	-4,29
- Belanja Barang dan Jasa	726.294,25	717.771,87	(8.522,38)	-1,17
- Belanja Modal	1.780.941,48	1.821.163,92	40.222,44	2,26
Surplus/ Defisit	(541.494,94)	(819.456,60)	(277.961,66)	51,33
III. PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	593.253,24	819.456,61	226.203,37	0,00
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	799.489,37	1.113.569,41	314.080,04	39,29
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	799.489,37	1.113.569,41	314.080,04	0,00
- Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penerimaan Piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	206.236,13	294.112,80	87.876,67	0,00
- Pembentukan Dana Cadangan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	67.090,00	194.112,80	127.022,80	0,00
- Pembayaran Pokok Utang	39.146,13	0,00	-39.146,13	-100,00
- Pembayaran Kekurangan Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Angg. Thn. Berkenaan (SILPA)	51.758,30	0,00	-51.758,30	-100,00

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

Memasuki semester II – 2007, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Pendapatan Daerah

ditargetkan 3,57 triliun sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp.4,39 triliun, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) Rp.1,11 triliun dan sisa anggaran tahun berjalan sebesar Rp.51,75 miliar. Masalah umum yang menjadi penyebab perubahan APBD Riau tahun 2007 adalah penyertaan modal ke PT.Riau Airline, PT.Bank Riau, PT. Sarana Pembangunan Riau serta eskalasi proyek *multiyears*.

Pendapatan Daerah menurun 2,18% dibandingkan anggaran sebelumnya menjadi Rp.3,57 triliun. Komposisi pendapatan daerah yang mengalami penurunan adalah Dana Perimbangan sebesar 7,33% menjadi 2,44 triliun, yang disebabkan turunnya dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 11,49% menjadi Rp.1,10 triliun. Peningkatan tertinggi terjadi pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mencapai 123,42% menjadi 108,84 miliar. Selanjutnya retribusi daerah meningkat 7,36% menjadi 34,36 miliar dan pajak daerah meningkat 3,28% menjadi 849,15 miliar.

Di sisi lain, belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung mengalami peningkatan 4,74% sehingga menjadi Rp.4,39 triliun. Belanja tidak langsung mengalami peningkatan tertinggi yang mencapai 15,88%, sehingga jumlahnya menjadi Rp.1,37 triliun. Peningkatan pada komponen belanja langsung dipicu oleh peningkatan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil kepada provinsi (provinsi /kab./kota & pemerintahan desa).

Selanjutnya, belanja langsung mengalami peningkatan yang tidak signifikan yang tercatat sebesar 0,35% sehingga jumlah belanja langsung menjadi Rp.3,01 triliun. Komposisi belanja langsung yang mengalami peningkatan hanya belanja modal (2,26%), sementara belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami penurunan masing-masing -4,29% dan -1,17%.

Penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan sebesar 39,29% sehingga menjadi Rp.1,11 triliun, yang berasal dari peningkatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah mengalami peningkatan yang lebih tinggi (42,61%). Peningkatan ini terutama dipicu oleh penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang peningkatannya mencapai 189,33% sehingga jumlahnya menjadi Rp.127,022 miliar.

4. Posisi Gabungan Keuangan Daerah (Propinsi dan Kabupaten/ Kota) Semester I - 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota pada tahun 2007 mencapai Rp.11,27 triliun. Pendapatan Daerah tertinggi berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar Rp.10,25 triliun. Komposisi terbesar berasal dari kabupaten Bengkalis yang mencapai Rp.1,59 triliun yang berasal dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak. Sementara jumlah terkecil berasal dari kabupaten Pelelawan yang tercatat sebesar Rp.555,35 miliar. Di sisi lain, belanja daerah seluruh kabupaten dan kota mencapai Rp.15,89 triliun. Belanja daerah tertinggi berasal dari kabupaten Bengkalis yang mencapai Rp.2,93 triliun, sementara belanja terendah berasal dari kabupaten Indragiri Hulu yang tercatat sebesar Rp.878,08 miliar.

Penerimaan pembiayaan daerah berjumlah Rp.7,14 triliun, sementara pengeluaran pembiayaan defisit Rp.784,17 miliar. Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari komponen sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya, dengan jumlah terbesar berasal dari kabupaten Bengkalis. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah yang mengalami defisit terbesar adalah Kabupaten Kampar yang mengalami defisit Rp.471,39 miliar.

III. Pengembangan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

1. Persetujuan dan Realisasi PMDN dan PMA

Dalam periode Januari sampai dengan juni 2007, perkembangan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terdapat pada 3 (tiga) sektor ekonomi yang telah disetujui yaitu investasi baru pada sektor industri makanan sebanyak 2 (dua) proyek dengan nilai sebesar Rp.238,7 miliar, perluasan investasi pada sektor peternakan dan industri makanan sebanyak 3 (tiga) proyek dengan nilai sebesar Rp.26,2 miliar, serta alih status pada sektor perkebunan dengan nilai sebesar Rp.41,4 miliar.

Tabel 1.13. Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Surat Perjanjian Menurut Sektor Di Provinsi Riau (Periode : Januari s/d Juni 2007)

No.	Sektor	BARU			PERLUASAN			ALIH STATUS			TOTAL			
		Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TENAGA KERJA TKI TKA	Jumlah
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	1	41.4	-	1	41.4	-	-
3	Peternakan	-	-	-	1	9.4	61	-	-	-	-	9.4	61	61
4	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Industri Makanan	2	238.7	207	1	15.8	-	-	-	-	2	254.5	207	207
8	Industri Konveksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Industri Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Industri Kertas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Industri Farmasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Industri Kimia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ind. Mineral Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ind. Logam Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ind. Barang Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Listrik dan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Bangunan/Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pedagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Hotel dan Restoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pengangkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Perumahan Kaw. Ind.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Jasa Lainnya	-	-	-	1	1.0	-	-	-	-	-	1.0	-	-
	JUMLAH	2	238.7	207	3	26.2	61	1	41.4	-	3	306.3	268	268

Sumber : Badan Promosi dan Investasi Provinsi Riau

Sementara itu, perkembangan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terjadi pada semua sektor ekonomi investasi baru sebanyak 9 (sembilan) proyek dengan nilai sebesar US\$.99.450 ribu, perluasan investasi sebanyak 12 proyek dengan nilai sebesar US\$.1.971.818 ribu, serta alih status sebanyak 2 (dua) proyek dengan nilai sebesar US\$.72.860 ribu.

Tabel 1.14. Nilai Investasi PMA Menurut Sektor Di Provinsi Riau (Periode : Januari s/d Juni 2007)

No.	Sektor	BARU		PERLUASAN		ALIH STATUS		TOTAL	
		Pry	INV (Ribu US\$)	Pry	INV (Ribu US\$)	Pry	INV (Ribu US\$)	Pry	INV (Ribu US\$)
	Sektor Primer	2	1,000	0	0.0	1	65,341	3	66,341
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	0	0	0	0	1	65,341	1	65,341
2	Peternakan	1	250	0	0	0	0	1	250
3	Kehutanan		250	0	0		0		250
4	Pertambangan	1	500	0	0.0	0	0.0	1	500.0
	Sektor Sekunder	5	94,250	5	1,942,818	0	5,658	5	2,042,726
5	Industri Makanan	2	15,000	0	0	0	5,658	2	20,658
6	Industri Kayu	1	2,250	1	211	0	0	1	2,461
7	Ind. Kertas, Brg dr. Kertas & Percetakan	0	0	3	1,885,385	0	0	0	1,885,385
8	Ind. Kimia Dasar, Brg Kimia & Farmasi	2	77,000	1	57,222	0	0	2	134,222
	Sektor Tersier	2	4,200	1	29,000	1	1,861	3	35,061
9	Elektrik, Gas dan Air	0	0	1	29,000	0	0	0	29,000
10	Perdagangan & Reparasi	1	3,950	0	0	0	356	1	4,306.0
11	Jasa Lainnya	1	250.0	0	0	1	1,505	2	1,755.0
	JUMLAH	9	99,450	12	1,971,818	2	72,860	11	2,144,128

Sumber : Badan Promosi dan Investasi Provinsi Riau

2. Peringkat realisasi PMDN dan PMA

Dari seluruh propinsi di Indonesia realisasi investasi PMDN dan PMA di provinsi Riau sampai dengan posisi bulan Agustus tahun 2007 telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Dalam periode Januari s/d Agustus 2007, propinsi Riau menempati urutan ke 4, baik dalam realisasi PMDN maupun PMA. Realisasi PMDN mencapai Rp.32.130,2 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 112 proyek, sedangkan realisasi PMA mencapai US\$.8.125,5 juta dengan jumlah proyek sebanyak 6 proyek.

Tabel 1.15. Peringkat Realisasi Investasi PMA dan PMDN Menurut Lokasi Periode Januari s/d Agustus 2007

PMDN					PMA				
NO	LOKASI	Proyek (Jumlah)	NILAI (Rp. Milyar)	%	NO	LOKASI	Proyek (Jumlah)	NILAI (US\$. Juta)	%
1	JAWA BARAT	23	10,843.8	33.75	1	DKI JAKARTA	244	4,294.7	52.85
2	JAMBI	2	4,474.6	13.93	2	JAWA TIMUR	52	1,654.2	20.36
3	DKI JAKARTA	25	3,821.3	11.89	3	JAWA BARAT	177	824.1	10.14
4	RIAU	11	3,095.2	9.63	4	RIAU	6	412.7	5.08
5	SULAWESI TENGGARA	1	2,768.9	8.62	5	BANTEN	50	169.7	2.09
6	SUMATERA UTARA	6	1,521.4	4.74	6	SUMATERA UTARA	12	160.0	1.97
7	JAWA TIMUR	10	1,215.3	3.78	7	JAWA TENGAH	35	96.9	1.19
8	BANTEN	17	1,001.0	3.12	8	KALIMANTAN TENGAH	2	77.2	0.95
9	SUMATERA SELATAN	3	636.5	1.98	9	KALIMANTAN SELATAN	5	59.0	0.73
10	SULAWESI UTARA	1	624.0	1.94	10	SUMATERA BARAT	3	56.4	0.69
11	SULAWESI TENGAH	2	487.6	1.52	11	KALIMANTAN TIMUR	12	54.8	0.67
12	KALIMANTAN TIMUR	2	431.1	1.34	12	LAMPUNG	3	48.3	0.59
13	BANGKA BELITUNG	1	313.7	0.98	13	SULAWESI SELATAN	6	47.6	0.59
14	KALIMANTAN TENGAH	1	280.9	0.87	14	SUMATERA SELATAN	3	42.6	0.52
15	JAWA TENGAH	3	273.0	0.85	15	KEPULAUAN RIAU	15	35.3	0.43
16	KALIMANTAN BARAT	2	95.1	0.30	16	BALI	46	33.7	0.41
17	KEPULAUAN RIAU	1	80.1	0.25	17	N. ACEH DARUSSALAM	2	17.3	0.21
18	KALIMANTAN SELATAN	-	66.7	0.21	18	JAMBI	1	15.5	0.19
19	LAMPUNG	-	50.7	0.16	19	SULAWESI UTARA	1	8.7	0.11
20	D.I YOGYAKARTA	-	33.1	0.10	20	SULAWESI TENGAH	-	7.1	0.09
21	BALI	1	15.1	0.05	21	NUSA TENGGARA BARAT	3	4.5	0.06
22	SULAWESI SELATAN	-	1.1	0.00	22	PAPUA	2	2.4	0.03
23	N. ACEH DARUSSALAM	-	-	0.00	23	D.I YOGYAKARTA	4	1.6	0.02
24	SUMATERA BARAT	-	-	0.00	24	KALIMANTAN BARAT	1	1.2	0.01
25	BENGKULU	-	-	0.00	25	BENGKULU	-	-	0.00
26	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	0.00	26	BANGKA BELITUNG	-	-	0.00
27	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	0.00	27	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	0.00
28	GORONTALO	-	-	0.00	28	SULAWESI TENGGARA	-	-	0.00
29	MALUKU	-	-	0.00	29	GORONTALO	-	-	0.00
30	MALUKU UTARA	-	-	0.00	30	MALUKU	-	-	0.00
31	PAPUA	-	-	0.00	31	MALUKU UTARA	-	-	0.00
JUM LAH		112	32,130.2	100.00	JUM LAH		685	8,125.5	100.00

Sumber : Website BKPM

IV. Perkembangan Ekspor-Impor Non Migas

Kinerja perdagangan luar negeri Propinsi Riau sampai dengan periode laporan (Januari s.d. Agustus 2007) masih mencatat surplus sebesar USD 2.246,63 juta lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor non migas pada triwulan laporan meningkat sebesar USD 799,06 juta atau 30,61% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari USD 2.610,40 juta menjadi USD 3.409,46 juta. Disisi lain nilai impor non migas juga mengalami peningkatan cukup tajam yaitu sebesar USD 774,02 juta (199,07%) yaitu dari USD 388.81 juta menjadi USD 1.162,82 juta.

Tabel 1.16. Perkembangan Ekspor-Impor Provinsi Riau
Periode Januari s.d. Agustus 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)

	Jan s.d. Agt .2006	Jan s.d. Agt .2007	Δ	% Δ
Ekspor	2,610.40	3,409.46	799,06	30.61
Impor	388.81	1,162.83	774.02	199.07

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

1. Ekspor Non Migas

Nilai ekspor non migas Propinsi Riau pada periode laporan tercatat sebesar USD 3.409,46 juta atau meningkat USD799,06 juta (30,61%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor komoditas utama propinsi Riau seperti minyak dan lemak nabati (CPO), kertas (Kertas, kertas karton dan olahannya), Olahan Minyak dan lemak Nabati dan Hewani, Batubara, kokas dan Briket, serta sayur dan buah.

Tabel 1.17. Ekspor Komoditas Unggulan Propinsi Riau
Periode Januari s.d. Agustus 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)

No	Kelompok	Jan-Agt 2006	%	Jan-Agt 2007	%	Kenaikan (%)
1	Minyak dan Lemak Nabati	1,390.48	53.27	2,052.86	60.21	47.64
2	Kertas, Kertas Karton dan Olahannya	404.98	15.51	526.49	15.44	30.00
3	Pulp dan Kertas	584.65	22.40	400.23	11.74	-31.54
4	Olahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	58.33	2.23	188.08	5.52	222.45
5	Batubara, kokas & brikets	33.77	1.29	60.70	1.78	79.75
6	Buah dan Sayur	41.03	1.57	43.69	1.28	6.48
7	Lainnya	97.16	3.72	137.41	4.03	41.43
	Total	2,610.40	100.00	3,409.46	100.00	30.61

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Ekspor kelompok minyak dan lemak nabati sangat mendominasi pangsa ekspor tersebut dimana nilainya tercatat sebesar USD 2.052,86 juta atau dengan pangsa 60,21% dari total ekspor non migas dan pada periode laporan nilainya meningkat 47,64% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan dunia terhadap minyak dan lemak nabati serta didukung oleh peningkatan kinerja industri untuk memenuhi permintaan tersebut.

Ekspor kelompok kertas, kertas karton dan olahannya tercatat sebesar USD 526,49 juta atau 15,44% dari total ekspor dan meningkat 30% dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya. Sementara itu ekspor pulp dan kertas tercatat sebesar USD 400,23 juta atau mengalami penurunan 31,54%. Mengingat kedua komoditas tersebut berada pada industri yang sama, maka kondisi di atas mencerminkan adanya pergeseran untuk menciptakan komoditi ekspor yang semula berbentuk barang setengah jadi/mentah menjadi barang jadi, sehingga proses penciptaan nilai tambah (*value added*) terhadap komoditi ekspor unggulan di Riau dapat semakin optimal, dan hal tersebut merupakan salah satu jawaban untuk meningkatkan kinerja ekspor daerah di masa mendatang.

Ekspor olahan minyak dan lemak nabati pada triwulan laporan tercatat sebesar USD 188,08 juta atau 5,52 % dari total ekspor, meningkat sebesar 222,45% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jenis olahan minyak dan lemak nabati terbesar yaitu Minyak dan lemak nabati/hewani, Cuka Olahan dan minyak cuka hasil penyulingan.

Komoditi ekspor non migas lainnya yaitu batubara, kokas dan briket pada periode laporan tercatat sebesar USD60,70 juta meningkat 79.75% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 33,77 juta. Peningkatan ini akibat masih tingginya permintaan dunia terhadap komoditi ini.

Sementara itu ekspor kelompok buah dan sayuran juga menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah ekspor tercatat sebesar USD 43,69 juta meningkat sebesar 1,28%.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor Propinsi Riau terbesar ke Singapore dengan total nilai ekspor mencapai USD 1.813,09 juta atau 53,18 % dari jumlah nilai ekspor, Hongkong sebesar USD 518,18 juta (15,20%) dan Malaysia sebesar USD 261,16 juta (7,80%).

Tabel 1.18. Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli
Periode Januari - Agustus 2006 dan 2007 (dalam juta USD)

No	Negara	Jan s.d. Agt. 2006	%	Jan s.d. Agt. 2007	%	Kenaikan	
						USD	%
1	Singapore	1,252.54	47.98	1,813.09	53.18	560.55	44.75
2	Hongkong	260.71	9.99	518.18	15.20	257.47	98.76
3	Malaysia	104.67	4.01	265.82	7.80	161.16	153.98
4	RRC	478.73	18.34	171.18	5.02	-307.54	-64.24
5	MEE	51.93	1.99	54.82	1.61	2.89	5.56
6	Francis	20.80	0.80	19.08	0.56	-1.71	-8.23
7	Australia	0.61	0.02	1.33	0.04	0.72	116.85
8	America	4.52	0.17	10.37	0.30	5.85	129.57
9	Africa	26.81	1.03	13.64	0.40	-13.16	-49.10
10	Lainnya	409.09	15.67	541.94	15.90	132.85	32.47
Total		2,610.40	100.00	3,409.46	100.00	799.06	30.61

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

2. Impor Non Migas

Impor non migas propinsi Riau pada periode laporan meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari USD 388.81 juta menjadi USD 1.162,83 juta atau meningkat sebesar 199,07%. Sebagian besar impor adalah dalam bentuk mesin industri, besi dan baja, mesin pembangkit tenaga, serta bahan baku penolong seperti pupuk, pulp dan kertas bekas, (lihat tabel 1.19). Hal ini memberikan indikasi positif karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan untuk kegiatan produktif khususnya di sektor industri, sehingga dapat mendorong kegiatan perekonomian secara umum.

Tabel 1.19. Impor Komoditas Unggulan Propinsi Riau
Januari s.d. Agustus 2006 dan 2007 (dalam jutaan USD)

No	Komoditas	Jan-Agt 2006	%	Jan-Agt 2007	%	Kenaikan (%)
1	Mesin Industri Tertentu	121.67	31.29	450.85	38.77	270.55
2	Mesin Industri dan perlengkapannya	60.13	15.46	166.76	14.34	177.34
3	Besi dan Baja	6.60	1.70	73.30	6.30	1009.98
4	Pulp dan Kertas Bekas	23.27	5.98	74.60	6.42	220.63
4	Mesin Pembangkit Tenaga	22.80	5.86	57.20	4.92	150.88
6	Pupuk Kimia Buatan Pabrik	38.75	9.97	52.87	4.55	36.45
7	Lainnya	115.59	29.73	287.25	24.70	148.51
Total		388.81	100.00	1,162.83	100.00	199.07

Barang impor sebagian besar berasal dari negara-negara di Asia, yaitu Singapura dengan nilai impor mencapai USD 445,18 juta atau 38,28% dari total impor, diikuti Hongkong sebesar USD 233,19 juta (20,05%), Australia sebesar USD 142,59 juta (12,26%). Sedangkan sisanya tersebar di negara lainnya di benua Africa, America dan Eropa.

Tabel 1.20. Impor Non Migas Menurut Negara Penjual Provinsi Riau Januari s.d. Agustus 2006 dan 2007 (dalam juta USD)

No	Negara	Jan s.d. Agt. 2006	%	Jan s.d. Agt. 2007	%	Kenaikan	
						USD	%
1	Singapura	143.14	36.81	445.18	38.28	302.05	211.02
2	Hongkong	87.36	22.47	233.19	20.05	145.83	166.94
3	Australia	21.59	5.55	142.59	12.26	121.00	560.56
4	Malaysia	47.37	12.18	74.19	6.38	26.82	56.63
5	Amerika Selatan	0.00	0.00	51.00	4.39	51.00	-
6	Negara Eropa lainnya	11.21	2.88	68.33	5.88	57.12	509.46
7	Lainnya	78.15	20.10	148.35	12.76	70.19	89.82
Total		388.81	100.00	1,162.83	100.00	774.02	199.07

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

3. Nilai Ekspor Non Migas dan Impor Non Migas Menurut Valuta dan Cara Pembayaran

Berdasarkan jenis valuta yang diperoleh dari kegiatan ekspor non migas, valuta USD merupakan yang terbesar. Tingginya penerimaan dalam valuta USD diperkirakan karena mata uang dimaksud bersifat *hard currencies*, atau dapat digunakan hampir diseluruh negara. Sedangkan kehadiran mata uang lainnya seperti IDR, EUR, SGD, MYR, CAD, dan GBP mengkomodir kebutuhan transaksi ekspor dari negaranya masing-masing.

Tabel.1.21. Nilai Ekspor Non Migas Propinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran Januari s.d. Agustus 2006 dan 2007(dalam juta USD)

No.	Valuta	Jan s.d. Agt. 2006	Jan s.d. Agt. 2007	No.	Cara Pembayaran	Jan s.d. Agt. 2006	Jan s.d. Agt. 2007
1	USD	2,572.35	3,347.34	1	Lainnya	1,174.63	1,731.47
2	IDR	18.07	27.62	2	Perhitungan Kemudian	710.31	684.14
3	EUR	7.39	22.33	3	Wesel Inkaso	419.77	605.18
4	SGD	4.34	3.22	4	Sight L/C	278.44	309.18
5	MYR	2.98	2.92	5	Pembayaran dimuka	27.16	54.98
6	CAD	4.01	1.59	6	Konsinyasi	0.09	0.13
7	GBP	1.22	3.10	7	Usance L/C	0.00	24.38
8	JPY	0.02	0.00				
9	AUD	0.00	1.34				
		2,610.39	3,409.46			2,610.40	3,409.46

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Untuk pembayaran ekspor non migas periode laporan lebih banyak digunakan cara Perhitungan Kemudian, (unsance L/C) yaitu mencapai USD 684,14 juta. Cara pembayaran seperti ini lazimnya diterima oleh perusahaan yang memiliki induk perusahaan di luar negeri.

Cara pembayaran lainnya adalah Wesal Inkaso sebesar USD605,18 juta, *Sight L/C* sebesar USD 309,18 juta, pembayaran dimuka sebesar USD 54,98 juta, Konsinyasi sebesar USD 0,13 juta, *Usance L/C* sebesar USD24,38 juta dan lainnya USD 1.731,47 juta.

Tabel.1.22. Nilai Impor Non Migas Provinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran Januari s.d. Agustus 2006 dan 2007 (dalam juta USD)

No.	Valuta	Jan s.d. Agt. 2006	Jan s.d. Agt. 2007	No.	Cara Pembayaran	Jan s.d. Agt. 2006	Jan s.d. Agt. 2007
1	USD	350.97	1,114.66	1	Non L/C	331.48	1,104.76
2	EUR	18.83	22.03	2	L/C	57.33	58.07
3	MYR	7.89	15.57				
4	SGD	10.01	10.38				
5	JPY	1.07	0.07				
6	Lainnya	0.04	0.12				
		388.81	1,162.83			388.81	1,162.83

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Sementara itu, kebutuhan valuta asing dalam rangka impor non migas propinsi Riau yang terbesar pada periode laporan adalah valuta USD yaitu sebesar USD 1.114,66 juta (95,86%). Sedangkan cara pembayaran untuk impor non migas pada periode yang sama adalah *Non L/C* yaitu sebesar USD 1.104,76 juta dan *L/C* hanya sebesar USD 58,07 juta. Banyaknya penggunaan cara pembayaran *Non L/C* ini merefleksikan adanya dasar saling percaya dalam transaksi perdagangan internasional disamping praktis dan efisien.

UPAYA PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN PERLU MENDAPAT PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan data dari Direktorat Bina Program Bina Marga, pada Maret 2006 kerusakan ruas jalan (berat dan ringan) di propinsi Riau diperkirakan mencapai 5.204,5 km atau 54,45%, dan saat ini kerusakan tersebut diperkirakan masih sebesar 40%. Kondisi ini perlu mendapat perhatian prioritas dari pemerintah, karena ketersediaan infrastruktur jalan merupakan faktor yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian.

KONDISI JALAN KABUPATEN THN 2006 (STATUS 1 MARET 2006) BERDASARKAN KRITERIA IRI

NO	PROVINSI	PANJANG KONDISI (Km)						Total (Km)
		BAIK		SEDANG		RUSAK(Ringan+Berat)		
		KM	%	KM	%	KM	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	15 (11+13)
1	N. ACEH D.	2,978.92	28.8%	2,995.44	29.0%	4,362.18	42.20%	10,336.54
2	SUMUT	2,709.49	12.2%	5,153.28	23.1%	14,410.26	64.70%	22,273.03
3	SUMBAR	2,989.50	24.6%	2,373.00	19.6%	6,774.65	55.82%	12,137.15
4	RIAU	1,105.10	11.6%	3,248.40	34.0%	5,204.50	54.45%	9,558.00
5	JAMBI	961.86	13.5%	1,335.25	18.7%	4,842.72	67.83%	7,139.83
6	BENKULU	244.45	6.5%	283.14	7.5%	3,234.09	85.97%	3,761.68
7	SUMSEL	1,583.13	22.5%	2,429.34	34.6%	3,017.85	42.93%	7,030.31
8	BABEL	460.40	20.4%	611.08	27.1%	1,186.64	52.55%	2,258.12
9	LAMPUNG	2,034.67	20.8%	3,394.70	34.7%	4,353.14	44.50%	9,782.51
Total		15,067.52	20.2%	21,823.62	26.6%	47,386.02	56.23%	84,277.17

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU (31-08-2006)

Dari sisi upaya menjaga kestabilan harga (inflasi), ketersediaan jalan yang memadai diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, karena faktor gangguan distribusi barang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap laju inflasi daerah. Sebagai gambaran dari inflasi propinsi Riau sebesar 1,92% pada triwulan III 2007, sebesar 2,87% berasal dari *volatile food* sedangkan inflasi yang dikategorikan sebagai *administered price* mencatat deflasi sebesar -0,95%. Besarnya inflasi yang berasal dari *volatile food* antara lain disebabkan karena adanya gangguan distribusi.

Sementara itu, dari sisi upaya menggairahkan iklim dunia usaha dan investasi, ketersediaan jalan merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan investor. Tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai tentunya akan menimbulkan kesulitan dalam mengundang masuknya investasi di daerah baik dalam bentuk PMA maupun PMDN.

Selain itu, penyediaan dan pembangunan infrastruktur jalan sangat diperlukan untuk membuka isolasi di daerah-daerah terpencil serta mendukung pemerataan pembangunan dan program pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan jalan akan memperlancar pemasaran hasil-hasil produksi dari sebagian besar masyarakat di pedesaan serta mendorong timbulnya industri-industri dan kegiatan perdagangan di pedesaan yang pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Melihat pentingnya ketersediaan infrastruktur jalan, maka hal tersebut perlu mendapat prioritas dari pemerintah daerah dan lembaga terkait antara lain dengan mengoptimalkan ketersediaan pembiayaan APBD.

Bab 2

PERKEMBANGAN

INFLASI DAERAH

1. Kondisi Umum

Pada triwulan III – 2007, perkembangan harga yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) kota Pekanbaru mengalami inflasi sebesar 1,92% (q-t-q), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami inflasi masing-masing sebesar -1,50% dan 1,21% (q-t-q), namun lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi nasional yang mencapai 2,27% (q-t-q). Faktor pendorong terjadinya inflasi adalah adanya bencana alam (gempa bumi) di Bengkulu dan Sumbar yang mengganggu jalur distribusi barang, dan adanya perayaan hari besar keagamaan yaitu Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga meningkatkan tekanan inflasi pada kelompok *volatile*

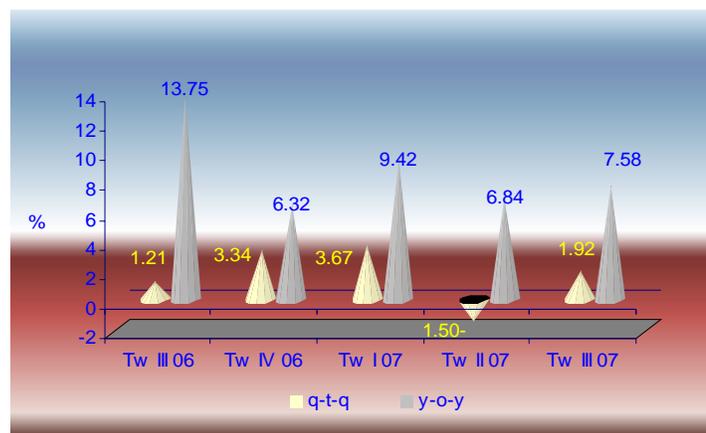
*food*¹. Melimpahnya pasokan beras membuat harga beras mengalami deflasi dan menjadi penyumbang deflasi yang cukup besar untuk kota Pekanbaru.

Laju inflasi inti² dalam triwulan III – 2007 tercatat sebesar 2,65%, sedangkan inflasi non inti yang terdiri dari *administered price*³ dan *volatile food* masing-masing sebesar -0,96% dan 2,87%.

2. Perkembangan dan Faktor Penyebab Inflasi di Kota Pekanbaru

Indeks Harga Konsumen (IHK) kota Pekanbaru pada triwulan laporan mengalami inflasi sebesar 1,92% lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi sebesar -1,50% dan inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,21%. Laju inflasi tahunan (y-o-y) 7,58%, atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,75%.

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Dalam triwulanan laporan, inflasi secara bulanan menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Pada bulan Juli, Agustus dan September terjadi inflasi masing-masing sebesar 0,47%, 0,34%, dan 1,09%. Inflasi yang terjadi pada bulan Juli didominasi oleh peningkatan pada kelompok kesehatan yaitu jamu, bedak, dan pembersih/penyegar. Sementara itu, inflasi pada bulan Agustus didominasi oleh kelompok bahan makanan yaitu

¹ Inflasi yang dipengaruhi shocks dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit, dll.

² Inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental, yaitu interaksi permintaan-penawaran dan lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, dll)

³ Inflasi yang dipengaruhi oleh shocks berupa kebijakan harga pemerintah, seperti BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

telur ayam ras dan ikan aso-aso. Selanjutnya, inflasi pada bulan September didominasi oleh peningkatan pada kelompok sandang dan bahan makanan sebagai kebutuhan pokok, yaitu baju muslim, kain sarung, ikan selais asap, ikan tenggiri, cabe rawit dan cabe hijau, daging ayam kampung dan daging kerbau. Hal ini seiring dengan menyambut bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Tabel 2.1. Inflasi dan Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa
Triwulan III Tahun 2007

NO	KELOMPOK	Juli		Agustus		September		Tw III 07	
		Inflasi (%)	Andil (%)						
1.	Bahan Makanan	1.29	0.37	0.78	0.23	1.25	0.37	3.36	0.97
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	1.05	0.19	0.54	0.10	0.06	0.01	1.66	0.29
3.	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	-1.01	-0.24	-0.17	-0.04	1.49	0.35	0.30	0.07
4.	Sandang	0.67	0.06	0.41	0.04	4.10	0.35	5.22	0.45
5.	Kesehatan	1.40	0.05	0.04	0.00	0.18	0.01	1.62	0.06
6.	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	0.96	0.04	0.52	0.02	0.00	0.00	1.49	0.07
7.	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.06	0.01	0.06	0.01
UMUM		0.47	0.47	0.34	0.34	1.09	1.09	1.92	1.92

Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, maka selama triwulan III – 2007 terjadi inflasi pada semua kelompok barang dan jasa. Kelompok sandang tercatat mengalami inflasi tertinggi yang mencapai 5,22%, diikuti kelompok bahan makanan sebesar 3,36%, sementara kelompok transpor (transpor, komunikasi dan jasa keuangan) tercatat mengalami inflasi terendah yaitu sebesar 0,06%. Tingginya tingkat inflasi pada kelompok tersebut didorong oleh adanya perayaan bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang tercermin dari meningkatnya harga pada komoditas nanas (50,01%), baju muslim (33,33%), selais asap (32,51%), wortel (29,07%) dan cabe rawit (27,02%).

Dilihat dari kontribusi terhadap inflasi kota Pekanbaru, kelompok bahan makanan memberikan kontribusi terbesar yang tercatat sebesar 0,97%, lalu diikuti oleh kelompok sandang dan kelompok makanan jadi (makanan jadi, minuman, rokok & tembakau) yang masing-masing tercatat sebesar 0,45% dan 0,29%. Adapun komoditas yang memberikan kontribusi inflasi terbesar antara lain daging ayam ras (0,34%), sewa rumah (0,34%), emas perhiasan (0,33%), cabe merah (0,15%), tongkol (0,14%), telur ayam ras (0,13%) dan rokok filter (0,13%).

Selain perayaan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, bencana gempa yang terjadi di Bengkulu dan Sumatera Barat pada bulan September turut menjadi pendorong tingginya kontribusi inflasi bahan makanan terhadap inflasi kota Pekanbaru. Kondisi ini disebabkan oleh terganggunya distribusi/pasokan barang dan spekulasi pasar yang berakibat terjadinya kenaikan harga beberapa komoditas yang berasal dari daerah tersebut. Sementara pasokan beras yang melimpah pada triwulan sebelumnya masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terganggu dengan adanya perayaan hari besar dan bencana alam tersebut. Hal ini didukung pula oleh kunjungan langsung Gubernur Riau dan jajarannya ke sejumlah pasar dan gudang Bulog dalam rangka memantau ketersediaan dan kestabilan harga menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat dalam upaya meredam kenaikan harga kebutuhan pokok. Operasi pasar minyak goreng yang dilakukan oleh Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Riau juga memberikan pengaruh terhadap upaya menahan laju kenaikan harga minyak goreng di Pekanbaru.

Sementara itu, sepuluh komoditi yang mengalami laju inflasi tertinggi adalah nanas, jamu, baju muslim, ice cream, selais asap, taman kanak-kanak, tas sekolah, wortel, pemutih dan cabe rawit. Namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan inflasi, maka komoditas daging ayam ras, sewa rumah, emas perhiasan, cabe merah, tongkol, telur ayam ras, rokok kretek filter, serai, selais asap dan taman kanak-kanak memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi di kota Pekanbaru.

Tabel 2.2. Perkembangan Komoditas yang Mengalami Inflasi dan Kontribusi Tertinggi Selama Triwulan III Tahun 2007

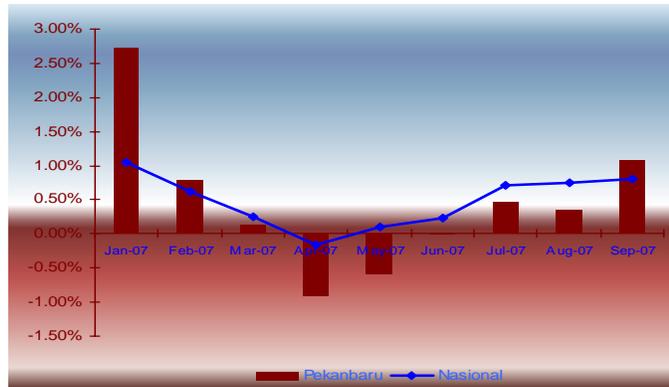
Triwulan III 2007					
No.	Komoditas	Inflasi (%)	No.	Komoditas	Kontribusi (%)
1	Nanas	50.01	1	Daging Ayam Ras	0.34
2	Jamu	36.22	2	Sewa Rumah	0.34
3	Baju Muslim	33.33	3	Emas Perhiasan	0.33
4	Ice Cream	33.00	4	Cabe Merah	0.15
5	Selais Asap	32.51	5	Tongkol	0.14
6	Taman Kanak-kanak	31.25	6	Telur Ayam Ras	0.13
7	Tas Sekolah	31.03	7	Rokok Kretek Filter	0.13
8	Wortel	29.07	8	Serai	0.12
9	Pemutih	28.95	9	Selais Asap	0.05
10	Cabe Rawit	27.02	10	Taman Kanak-kanak	0.04

Sumber : BPS Propinsi, diolah

Dari grafik 2.2. terlihat bahwa sejak Maret 2007 sampai dengan Agustus 2007 inflasi kota Pekanbaru cenderung lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional, hal ini berbeda

dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dimana inflasi Pekanbaru cenderung lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Namun inflasi tahunan (y-o-y) kota Pekanbaru masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 7,58% sementara inflasi nasional sebesar 6,95%.

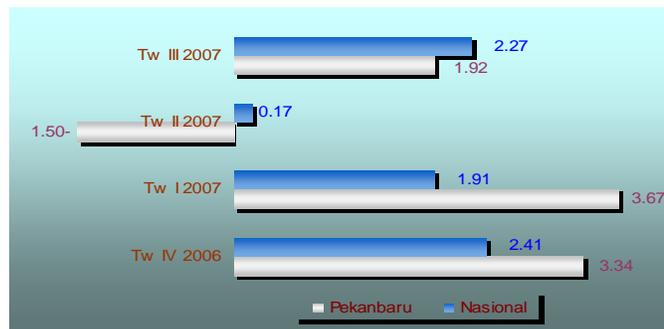
Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru dan Nasional secara Bulanan



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Penyumbang utama inflasi nasional pada bulan Juli adalah daging ayam ras dan ikan segar yang masing-masing sebesar 0,13% dan 0,06%. Pada bulan Agustus komoditas yang menjadi penyumbang utama adalah minyak tanah dan minyak goreng yang masing-masing tercatat sebesar 0,16% dan 0,06%. Sementara itu, pada bulan September 2007 komoditas ikan segar dan uang kulih akademi/PT menjadi penyumbang utama dengan andil masing-masing sebesar 0,10%.

Grafik 2.3. Inflasi kota Pekanbaru dan Nasional



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

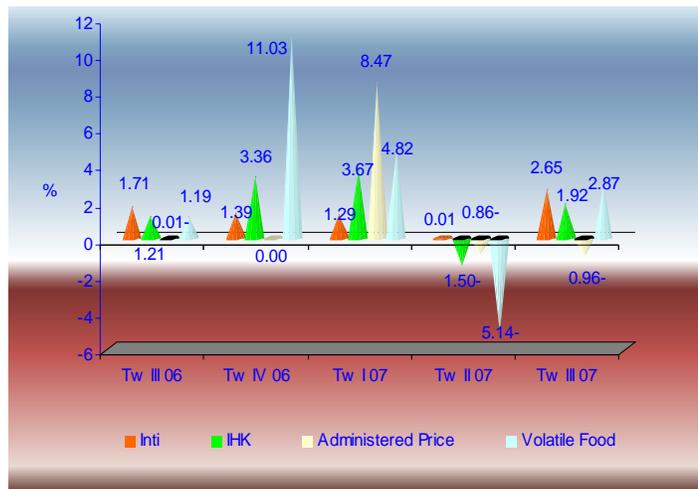
Laju inflasi nasional pada triwulan laporan mencapai 2,27% (q-t-q) atau lebih tinggi dari inflasi Pekanbaru, demikian juga halnya dengan inflasi pada triwulan II-2007. Sementara pada triwulan-triwulan sebelumnya laju inflasi kota Pekanbaru lebih tinggi dari inflasi

nasional. Laju inflasi nasional dan kota Pekanbaru secara triwulanan ditunjukkan oleh grafik 3.3. Inflasi kota Pekanbaru dan Nasional.

3. PERKEMBANGAN KOMPONEN-KOMPONEN INFLASI DI KOTA PEKANBARU

Pada triwulan laporan, perkembangan inflasi inti menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Tingginya permintaan akan barang dan jasa menjelang hari Raya Idul Fitri menjadi penyebab utama peningkatan inflasi inti pada triwulan III – 2007 dan memberikan kontribusi terhadap inflasi sebesar 1,41%.

Grafik 2.4. Perkembangan Komponen-Komponen Inflasi

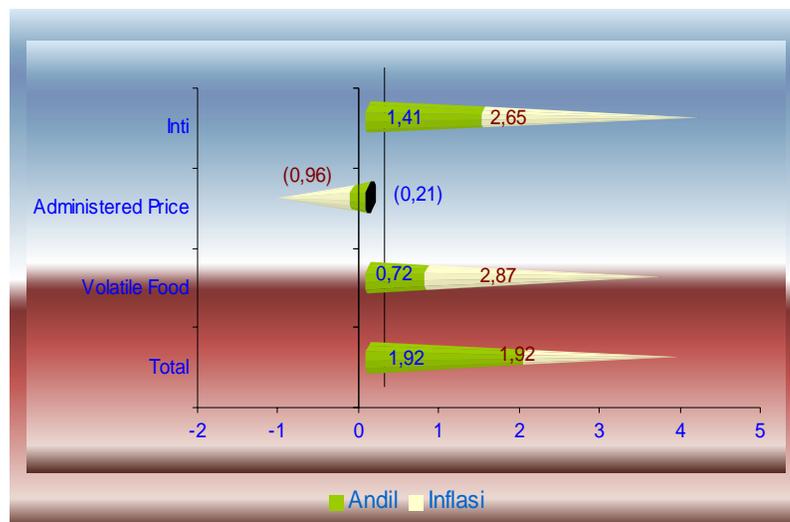


Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Sementara itu, meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan, meningkatkan laju inflasi yang terjadi pada komponen *volatile food* dari deflasi 5,14% menjadi inflasi 2,87% dan memberikan kontribusi terhadap inflasi sebesar 0,72%. Inflasi pada beberapa komponen *volatile food* mengalami peningkatan yang signifikan. Barang dan jasa komponen *volatile food* yang mengalami inflasi antara lain wortel, cabe rawit, cabe hijau, daging ayam ras dan, telur ayam ras.

Inflasi pada kelompok *administered price* masih terus mengalami penurunan, pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,96% dengan andil terhadap inflasi sebesar -0,21%. Barang dan komponen *administired price* yang mengalami penurunan harga (deflasi) adalah minyak tanah sebesar 16,67% dengan andil terhadap inflasi -0,41%.

Grafik 2.5. Disagregasi Inflasi di Kota Pekanbaru Triwulan III-2007



Sumber : BPS Propinsi Riau, diolah

Bab 3

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH

1. Kondisi Umum

KONDISI moneter dan perbankan di provinsi Riau selama triwulan laporan secara umum menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Perbaikan indikator-indikator ekonomi makro yang terus berlanjut mendorong peningkatan aktivitas perekonomian di Provinsi Riau. Selama triwulan laporan, Bank Indonesia melonggarkan kebijakannya dengan menurunkan BI – Rate sebesar 25 basis point (bps) menjadi 8,25%. Penurunan tersebut sudah direspon oleh perbankan dengan penurunan suku bunga deposito dan suku

bunga kredit. Likuiditas perbankan yang tidak disalurkan dalam bentuk kredit pada akhirnya ditanamkan dalam bentuk SBI sebagai alternatif penanaman dana yang aman bagi perbankan dan sesuai dengan *maturity* dari dana yang diterima.

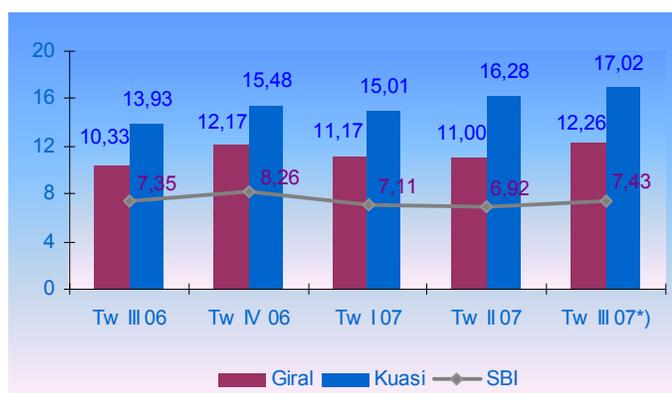
Pengelolaan risiko kredit perbankan menunjukkan perbaikan dengan turunnya jumlah kredit bermasalah dan rasio *Non Performing Loans* (NPLs) meskipun jumlah kredit yang disalurkan mengalami peningkatan. Beban operasional perbankan menunjukkan penurunan yang disebabkan oleh penurunan beban bunga perbankan terhadap dana milik masyarakat. Likuiditas perbankan dalam triwulan laporan masih tetap terjaga namun lebih tingginya pertumbuhan dana dibandingkan dengan pertumbuhan penyaluran kredit menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mengalami penurunan. Pangsa Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total kredit masih terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini merupakan indikasi adanya potensi dan kepedulian perbankan dalam pengembangan UMKM.

2. Perkembangan Moneter

Kondisi ekonomi yang terus menunjukkan perbaikan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, yang tercermin dari peningkatan indikator-indikator moneter (peredaran uang) seperti uang kuasi (tabungan dan deposito) maupun uang giral. Pertumbuhan indikator-indikator tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya, kecuali pertumbuhan uang kuasi. Sementara itu, jumlah SBI yang dimiliki oleh perbankan di Provinsi Riau mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh peningkatan dana Pemda yang meningkat 11,44% dibandingkan dengan triwulan II-2007.

Pada triwulan laporan, jumlah uang kuasi mengalami peningkatan dari Rp.16.277 miliar menjadi Rp.17.022 miliar atau tumbuh sebesar 4,58%, uang giral meningkat dari Rp.11.002 miliar menjadi Rp.12.263 miliar atau meningkat sebesar 11,47% dibandingkan dengan triwulan II - 2007. Dengan demikian secara total dana pihak ketiga (giro, tabungan dan deposito) yang merupakan bagian dari komponen uang beredar mengalami peningkatan sebesar Rp.2.007 miliar (7,36%) menjadi sebesar Rp.29.285 miliar. Di sisi lain, seiring dengan peningkatan uang giral, posisi penanaman dalam SBI juga meningkat sebesar Rp.514 miliar (7,42%) menjadi Rp.7.432 miliar.

Grafik 3.1. Perkembangan Uang Kuasi, Giral dan SBI di Provinsi Riau



*) data sampai dengan Agustus 2007

3. Perkembangan Perbankan

Kondisi perbankan di provinsi Riau pada triwulan laporan menunjukkan perkembangan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, baik jaringan kantor, aset, dana pihak ketiga maupun kredit yang disalurkan. Selain itu juga terjadi perbaikan kualitas kredit serta peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM.

3.1. Bank Umum

3.1.1. Jaringan Kantor

Tabel 3.1. Perkembangan Bank di Propinsi Riau

Keterangan	Periode	
	Tw II 07	Tw III 07
1. Jumlah Bank	33	34
- Pemerintah	6	6
- Swasta	21	21
- Asing	1	2
- Syariah	2	2
- Unit Usaha Syariah	3	3
2. Kantor Pusat	1	1
3. Kantor Cabang	65	66
- Pemerintah	41	41
- Swasta	23	23
- Asing	1	2
4. Kantor Cab. Pembantu	85	85
- Pemerintah	48	46
- Swasta	37	39
- Asing	0	0
5. Kantor Kas	34	35
- Pemerintah	22	22
- Swasta	12	13
6. BR Unit	71	70
7. DSP	12	12
8. Lainnya *)	38	43
	306	312

*) Payment point, VOA, RCR, Kantor Layanan Syariah dan Giral

Jumlah bank umum yang beroperasi di Provinsi Riau hingga akhir triwulan laporan tercatat 34 bank, bertambah 1 bank yaitu bank DBS. Selama triwulan laporan terdapat pembukaan 1 Kantor Cabang, 1 KCP, dan 5 kantor layanan setingkat *payment point*. Dengan demikian sampai dengan triwulan III - 2007 jumlah jaringan kantor menjadi 312 kantor atau bertambah 6 kantor dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Diperkirakan perluasan jaringan kantor bank umum di Provinsi Riau masih akan berlanjut, termasuk kemungkinan masuknya bank-bank asing atau campuran. Saat ini terdapat 2 bank umum yang telah mengajukan izin pembukaan Kantor Cabang di Pekanbaru, sehingga sampai dengan akhir 2007 diperkirakan jumlah bank akan mencapai 35 bank. Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin matang, dan perkembangan ekonomi di kota/kabupaten yang cukup pesat merupakan insentif bagi bank-bank untuk membuka jaringan kantornya. Penyebaran kantor bank sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2. menunjukkan bahwa penyebaran kantor masih terpusat di kota Pekanbaru, sedangkan di beberapa kabupaten lainnya jumlah kantor yang beroperasi masih relatif terbatas.

Tabel 3.2. Jaringan Kantor Bank Umum di Provinsi Riau (September 2007)

No.	Kab./Kota	Jumlah Kantor Bank Umum di Kabupaten/Kota						
		KP	KC	KCP	KK	BRI Unit	DSP	Lainnya
1	Pekanbaru	1	38	44	18	14	4	21
2	Bengkalis	-	7	10	2	11	1	6
3	Dumai	-	6	2	2	5	1	4
4	Indragiri Hulu	-	4	3	5	4	1	1
5	Indragiri Hilir	-	3	2	0	8	0	2
6	Kampar	-	2	3	1	9	1	3
7	Kuantan Singingi	-	1	2	2	5	1	3
8	Pelalawan	-	1	7	0	4	1	1
9	Rokan Hulu	-	1	3	1	2	1	0
10	Rokan Hilir	-	2	4	2	4	1	0
11	Siak	-	1	5	2	4	0	2
Total		1	66	85	35	70	12	43

Tabel 3.3. Data ATM Bank Per Kabupaten/Kota Di Propinsi Riau

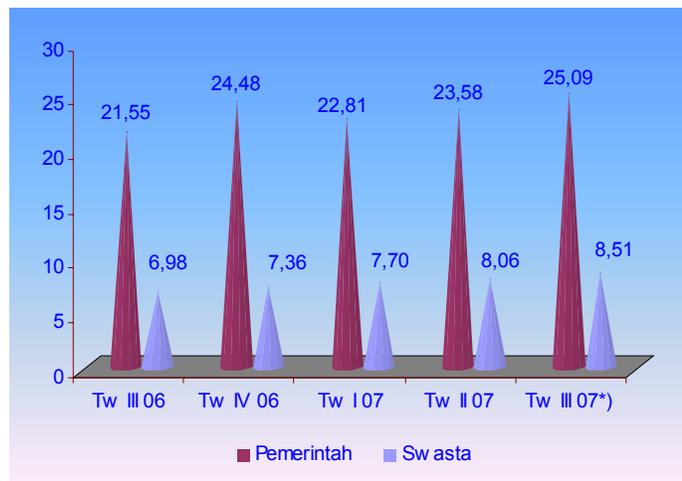
No.	Keterangan	Tw II 07	Tw III 07
I. Kabupaten/Kota			
1	Pekanbaru	209	211
2	Dumai	14	14
3	Bengkalis	29	29
4	Inhil	6	7
5	Inhu	4	4
6	Rohil	7	7
7	Rohul	3	3
8	Kampar	3	3
9	Siak	16	17
10	Palalawan	12	12
11	Kuantan Singingi	3	3
	Jumlah	306	310
II. Kelompok Bank			
1	Pemerintah	169	168
2	Swasta	137	142
	Jumlah	306	310

Seiring dengan penambahan jumlah kantor bank, jumlah ATM yang beroperasi juga mengalami peningkatan. Selama triwulan laporan jumlah ATM bertambah sebanyak 4 unit sehingga menjadi 310 unit. Penambahan ATM hanya terjadi pada kelompok bank swasta, sedangkan pada kelompok bank pemerintah terjadi penutupan 1 unit ATM.

3.1.2. Perkembangan Aset

Total aset bank umum di provinsi Riau pada triwulan laporan sebesar Rp.33.600 miliar meningkat Rp.1.959 miliar atau 6,19% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi baik pada kelompok bank pemerintah maupun kelompok bank swasta, sebagai dampak dari meningkatnya dana pihak ketiga. Aset kelompok bank pemerintah mengalami peningkatan tertinggi, yaitu sebesar 6,41% sedangkan kelompok bank swasta sebesar 5,55%. Sementara itu, pangsa aset bank pemerintah mencapai 74,68% dan bank swasta sebesar 25,32%.

Grafik 3.2. Perkembangan Aset Perbankan di Provinsi Riau



*) data sampai dengan Agustus 2007

3.1.3. Kredit

Walaupun kredit yang disalurkan terus menunjukkan *trend* peningkatan, namun di sisi lain jumlah *Undisbursed Loan* juga meningkat. Penyaluran kredit kepada sektor UMKM juga meningkat dan semakin mendominasi total kredit perbankan.

3.1.3.1. Perkembangan Penyaluran Kredit

Posisi kredit yang disalurkan oleh bank umum pada triwulan laporan mencapai Rp.15.145 miliar meningkat 3,96% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya Rp.14.568 miliar. Kondisi ini memberikan indikasi positif terhadap kegiatan perekonomian dan diharapkan akan terus berlanjut pada triwulan yang akan datang. Keyakinan ini didasarkan oleh beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain melalui penurunan

suku bunga SBI dan dikeluarkannya PBI No.9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum serta ketentuan tentang penyaluran kredit kepada sektor pertanian.

Tabel 3.4. Posisi Kredit Di Provinsi Riau
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)	Δ
A. Kelompok Bank						
1. Bank Pemerintah	9.089.684	9.625.537	9.628.109	9.935.275	10.312.109	3,79%
2. Bank Swasta	4.213.354	4.229.304	4.374.326	4.632.936	4.832.421	4,31%
B. Jenis Penggunaan						
1. Modal Kerja	4.497.601	4.921.399	4.965.493	5.078.287	5.139.826	1,21%
2. Investasi	4.897.612	4.807.768	4.768.110	4.849.186	5.070.358	4,56%
3. Konsumsi	3.907.825	4.125.674	4.268.832	4.640.738	4.934.346	6,33%
C. Valuta						
1. Rupiah	11.870.866	12.327.023	12.477.855	13.074.858	13.590.710	3,95%
2. Valas	1.432.172	1.527.818	1.524.580	1.493.353	1.553.820	4,05%
D. Total	13.303.038	13.854.841	14.002.435	14.568.211	15.144.530	3,96%

*) data sampai dengan Agustus 2007

Dilihat dari jenis valutanya, kredit dalam mata uang rupiah tumbuh sebesar 3,95% menjadi sebesar Rp.13.591 miliar, kredit dalam valuta asing juga tumbuh 4,05% menjadi Rp.1.554 miliar. Relatif stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing memberikan pengaruh terhadap kondisi tersebut. Pangsa kredit rupiah terhadap total kredit sebesar 89,74% atau meningkat dibanding dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 89,35%.

3.1.3.2. Konsentrasi Kredit

Berdasarkan jenis penggunaan, jumlah kredit modal kerja mencapai Rp.5.140 miliar atau tumbuh 1,21% dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan kredit investasi sebesar Rp.5.070 miliar atau tumbuh sebesar 4,56%. Pangsa kredit modal kerja tercatat sebesar 33,94% dari total kredit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 34,86%, sementara kredit investasi mencapai 33,48% dari total kredit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 33,29%. Pangsa terbesar kredit modal kerja disalurkan kepada subsektor perdagangan eceran yaitu 29,17%, diikuti subsektor perkebunan sebesar 12,92%. Untuk kredit investasi, pangsa terbesar disalurkan kepada subsektor perkebunan yaitu sebesar 43,84%, diikuti subsektor industri bahan kertas sebesar 13,50%. Besarnya kredit terhadap sektor perkebunan berdampak pada tingginya pertumbuhan dan sumbangan sektor ini dalam pembentukan PDRB Riau.

Grafik 3.3. Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan Di Provinsi Riau



*) data sampai dengan Agustus 2007

Sementara itu, kredit konsumsi masih terus menunjukkan peningkatan, dan pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp.4.934 miliar atau mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,33%. Pangsa kredit konsumsi mencapai 32,58% dari total kredit dan sekitar 29,87% dari kredit konsumsi tersebut adalah kredit untuk perumahan, terutama perumahan type 70 ke bawah. Tingginya pertumbuhan kredit konsumsi untuk perumahan tersebut mengindikasikan kebutuhan masyarakat akan perumahan masih cukup tinggi.

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, kredit masih terkonsentrasi pada sektor pertanian yang mencapai 21,79% dari total kredit atau mencapai Rp.3.299 miliar. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp.2.887 miliar (87,51%) merupakan kredit kepada subsektor perkebunan. Tingginya pangsa kredit yang disalurkan pada subsektor perkebunan terutama dipengaruhi oleh besarnya skala usaha di sub sektor perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa sehingga mampu menyerap kredit dalam jumlah besar. Luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektar atau 27% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mencapai 5,54 juta hektar.

Sektor usaha yang juga menyerap kredit cukup besar adalah sektor perdagangan (perdagangan, restoran dan hotel), yaitu sebesar Rp.3.096 miliar atau 20,44% dari total kredit. Penyerapan kredit yang tinggi pada sektor perdagangan tidak terlepas dari pengaruh peningkatan aktivitas ekonomi di Riau. Dengan melihat perkembangan yang menggembirakan untuk kredit pada sektor perdagangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi penyaluran kredit oleh perbankan sudah sejalan dengan kebijakan ekonomi daerah yang

terlihat dari besarnya peranan sektor-sektor tersebut dalam pembentukan PDRB yang pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan.

Sementara itu, kredit kepada sektor industri tercatat sebesar Rp.1.727 miliar atau 11,40%, dan kredit kepada sektor lain-lain tercatat sebesar Rp. 4.937 miliar atau 32,60% dari total kredit. Pada kredit sektor lain-lain tersebut termasuk kredit perumahan yang tercatat Rp.1.965 miliar. Kredit kepada sektor jasa mencapai Rp.1.125 miliar atau 7,43% dari total kredit dan kredit sektor konstruksi tercatat sebesar Rp.619 miliar atau 4,09% dari total kredit. Jumlah tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan perkembangan sektor properti di Provinsi Riau, sehingga ditengarai banyak *developer* yang menggunakan *self financing* untuk membiayai proyeknya.

Dilihat dari penyebaran kredit di kota/kabupaten, kredit yang disalurkan oleh perbankan masih terkonsentrasi di kota Pekanbaru. Posisi kredit yang disalurkan oleh perbankan di kota ini sampai akhir periode laporan tercatat sebesar Rp.11.139 miliar (73,55%). Kondisi tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat kota Pekanbaru adalah ibukota provinsi, sehingga disamping berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kota ini juga menjadi pusat bisnis utama baik perbankan maupun non perbankan yang tumbuh cukup pesat di era otonomi daerah.

Besarnya potensi ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Riau juga terlihat dari lebih besarnya penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek. Jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar Rp.23.368 miliar. Posisi kredit berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan posisi kredit berdasarkan lokasi bank pada semua kota/kabupaten. Kredit berdasarkan lokasi proyek pada triwulan laporan mengalami peningkatan pada semua kota/kabupaten. Peningkatan tertinggi terdapat di Kabupaten Bengkalis yang mencapai 29,57%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya.

Tabel 3.5. Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II
Di Provinsi Riau (Jutaan Rupiah)

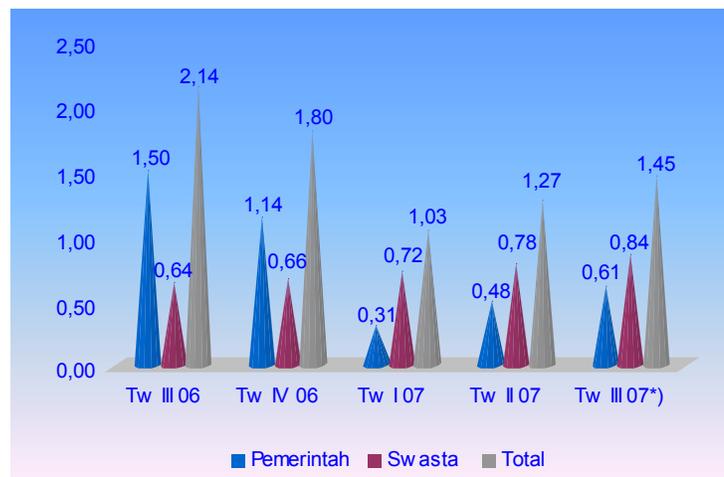
No	Kab./Kota	Lokasi Bank			Lokasi Proyek di Riau		
		Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)
1	Pekanbaru	10.519.123	10.737.120	11.139.269	11.003.165	11.403.294	11.876.702
2	Bengkalis	393.854	421.201	420.482	1.067.299	1.366.591	1.770.633
3	Dumai	551.231	609.053	636.234	897.156	822.670	859.522
4	Indragiri Hilir	734.344	742.532	760.589	1.196.817	1.237.341	1.258.121
5	Indragiri Hulu	561.651	653.873	684.465	1.717.276	1.791.158	1.908.302
6	Lainnya	1.242.232	1.404.432	1.503.491	4.215.053	5.413.438	5.694.435
Jumlah		14.002.435	14.568.211	15.144.530	20.096.766	22.034.492	23.367.715

*) data sampai dengan Agustus 2007

3.1.3.3. Undisbursed Loan dan Persetujuan Kredit Baru

Jumlah *undisbursed loan* (kredit yang belum ditarik) pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan dari Rp.1.265 miliar menjadi Rp.1.451 miliar atau meningkat sebesar 14,67%. Dari jumlah tersebut, sebesar 58,16% tercatat pada kelompok bank swasta dan 41,84% pada kelompok bank pemerintah. Peningkatan jumlah *undisbursed loan* antara lain disebabkan oleh adanya sumber pembiayaan lain yang digunakan oleh masyarakat dan beberapa kendala yang dihadapi pengusaha/investor seperti ketersediaan infrastruktur dan masalah perizinan.

Grafik 3.4. Jumlah *Undisbursed Loan* Perbankan Provinsi Riau



*) data sampai dengan Agustus 2007

Bila dilihat dari jenis penggunaannya 90,24% dari kredit yang belum ditarik tersebut merupakan kredit modal kerja, sementara kredit investasi dan konsumsi masing-masing mencapai 8,93% dan 0,84% dari total kredit yang belum ditarik. Berdasarkan sektor

ekonomi 38,78% dari kredit yang belum ditarik tersebut merupakan kredit kepada sektor perdagangan. Sektor lain yang mempunyai kelonggaran tarik cukup besar adalah sektor pertanian, jasa dan konstruksi yang masing-masing tercatat sebesar 24,00%, 14,55% dan 11,86% dari total kredit yang belum ditarik.

Persetujuan kredit sampai dengan triwulan laporan telah mencapai Rp.1.479 miliar, yang masih tetap didominasi oleh kredit konsumsi yang mencapai 40,71% dari total kredit *undisbursed loan*. Sementara pangsa *undisbursed loan* untuk kredit modal kerja dan Investasi mengalami peningkatan yang masing-masing tercatat sebesar 35,55% dan 23,74%.

Tabel 3.6. Persetujuan Kredit Baru
Di Provinsi Riau

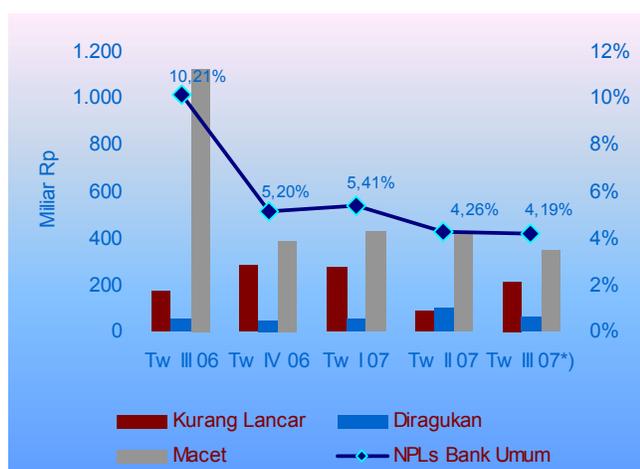
Jenis Penggunaan	Tw III 06		Tw IV 06		Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07*)	
	Rp. Juta	%								
1. Modal Kerja	495.053	31,51	819.377	47,12	615.992	33,56	731.207	35,13	525.922	35,55
2. Investasi	457.743	29,13	356.390	20,50	422.917	23,04	465.041	22,34	351.229	23,74
3. Konsumsi	618.546	39,36	563.047	32,38	796.350	43,39	885.329	42,53	602.293	40,71
Jumlah	1.571.342	100	1.738.814	100	1.835.259	100	2.081.577	100	1.479.444	100

*) data sampai dengan Agustus 2007

3.1.3.4. Kualitas Kredit

Kualitas kredit menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercermin dari turunnya rasio *Non Performing Loans* (NPLs) dari 4,26% menjadi 4,19%, dan bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,21%. Trend penurunan NPLs sudah berlangsung sejak Triwulan III - 2006 sebagai hasil dari beberapa upaya yang dilakukan perbankan baik melalui penagihan yang intensif maupun restrukturisasi kredit. Bila pembentukan pencadangan aktiva produktif diperhitungkan dalam rasio NPLs, maka rasio NPLs net perbankan pada triwulan laporan sebesar 2,98%.

Grafik 3.5. Perkembangan NPLs Gross
Di Provinsi Riau



*) data sampai dengan Agustus 2007

Berdasarkan sektor yang dibiayai, sektor konstruksi mempunyai NPLs tertinggi yang mencapai 16,72%, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 18,14%. Sementara sektor listrik, gas dan air yang pada triwulan sebelumnya mempunyai NPLs sebesar 15,35%, maka pada triwulan laporan menurun hanya menjadi 3,61%. Mengingat pangsa kredit pada sektor ini relatif kecil (0,01%), maka prosentase NPLs pada sektor ini tidak terlalu mempengaruhi kualitas kredit secara keseluruhan. Sementara itu, NPLs terendah adalah sektor pertambangan, yaitu sebesar 0,00%, mengalami perbaikan dibanding periode sebelumnya yang tercatat 0,71%.

Tabel 3.7. NPLs Per Sektor Ekonomi Di Provinsi Riau

No	Sektor Ekonomi	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)
1	Pertanian	2,44%	5,61%	5,73%	3,47%	3,51%
2	Pertambangan	0,00%	11,38%	10,19%	0,71%	0,00%
3	Perindustrian	48,76%	7,55%	8,34%	1,35%	1,35%
4	Listrik, Gas dan Air	0,00%	0,00%	22,30%	15,35%	3,61%
5	Konstruksi	16,73%	18,90%	19,32%	18,14%	16,72%
6	Perdag., Resto. & Hotel	6,63%	5,56%	5,98%	5,79%	6,47%
7	Pengangkutan, Pergud.	2,27%	1,62%	2,18%	5,49%	6,44%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	3,46%	3,37%	3,88%	6,21%	4,96%
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	10,39%	11,93%	11,90%	12,90%	12,61%
10	Lain-lain	2,24%	2,25%	2,24%	2,54%	2,14%

*) data sampai dengan Agustus 2007

Berdasarkan penyebarannya, rasio NPLs tertinggi terdapat pada Kabupaten Bengkalis, yaitu sebesar 5,89% atau mengalami perbaikan dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,31%, diikuti Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang mencapai 4,95% dan 2,18%. Selanjutnya Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu masing masing tercatat 1,86% dan 0,65%.

Tabel 3.8. NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten
Di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)
1	Pekanbaru	12,89%	4,07%	4,52%	4,80%	4,95%
2	Dumai	1,53%	5,87%	5,79%	2,14%	2,18%
3	Bengkalis	5,62%	0,80%	1,36%	6,31%	5,89%
4	Indragiri Hulu	0,85%	2,22%	2,17%	0,85%	0,65%
5	Indragiri Hilir	2,61%	30,66%	29,98%	1,88%	1,86%
6	Lainnya	0,70%	0,61%	1,03%	2,78%	1,25%

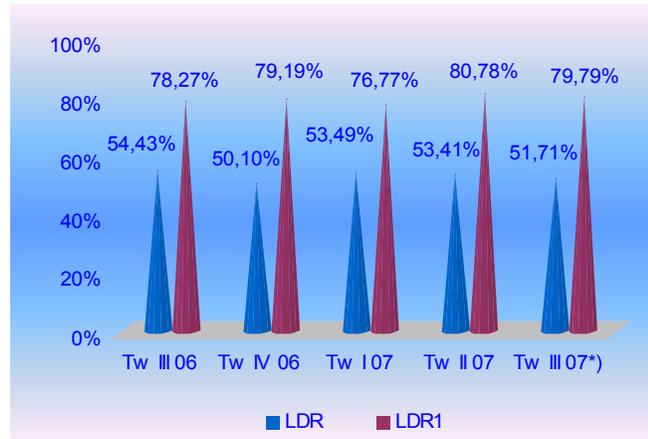
*) data sampai dengan Agustus 2007

3.1.4. Intermediasi Perbankan

3.1.4.1. Perkembangan LDR

Pada triwulan laporan terjadi peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp.2.007 miliar (7,36%) dari Rp.27.278 miliar menjadi Rp.29.285 miliar. Berdasarkan kepemilikan peningkatan tersebut terjadi baik pada dana milik pemerintah daerah maupun dana milik perorangan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penyaluran kredit sehingga menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan Riau pada periode laporan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya dari 53,41% menjadi 51,71%. Di sisi lain, jika kredit yang disalurkan oleh perbankan di luar Provinsi Riau untuk membiayai proyek di Riau turut diperhitungkan, maka LDR mencapai 79,79%, namun juga mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 80,78%. Hal ini menunjukkan bahwa secara total penyaluran kredit perbankan di Provinsi Riau sudah cukup tinggi.

Grafik 3.6. Perkembangan LDR Di Provinsi Riau



Ket : LDR1 = rasio kredit berdasarkan lokasi proyek terhadap DPK
*) data sampai dengan Agustus 2007

3.1.4.2. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Penyaluran kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan laporan kredit kepada UMKM tercatat sebesar Rp.10.454 miliar, meningkat 4,08% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit secara keseluruhan pada triwulan laporan. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan terus mengalami peningkatan yaitu mencapai 69,03% dari total kredit. Kondisi ini merupakan indikasi adanya potensi dan kepedulian perbankan dalam pengembangan UMKM.

Tabel 3.9. Perkembangan Kredit UMKM di Provinsi Riau

Plafon	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)
	(Rp. Juta)				
Kredit Mikro (Rp.0 - 50 jt)	3.218.001	3.370.785	3.417.303	3.713.768	3.772.222
Kredit Kecil (Rp.50 jt - Rp. 500 jt)	2.828.557	2.999.749	3.177.459	3.667.609	3.957.607
Kredit Menengah (Rp.500 jt - Rp.5 m)	2.260.357	2.362.892	2.443.806	2.663.453	2.724.540
Kredit Corporate (> Rp.5 m)	4.996.123	5.121.415	4.963.867	4.523.381	4.690.161
Total Kredit	13.303.038	13.854.841	14.002.435	14.568.211	15.144.530
Total Kredit UMKM	8.306.915	8.733.426	9.038.568	10.044.830	10.454.369
(% terhadap Total Kredit)	62,44%	63,04%	64,55%	68,95%	69,03%

*) data sampai dengan Agustus 2007

Menurut jenis penggunaan, sebesar 52,89% dari total pembiayaan kepada UMKM digunakan untuk sektor produktif (kredit modal kerja dan investasi) dan sisanya untuk

pembiayaan konsumsi. Pangsa pembiayaan kepada sektor produktif ini menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 53,90%, sedangkan pangsa kredit konsumsi menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, sektor perdagangan mempunyai pangsa terbesar yaitu mencapai 24,77%, diikuti sektor pertanian sebesar 12,20%, sektor jasa 8,21%, sektor konstruksi 3,69%, perindustrian 2,00%, pengangkutan 1,70%, pertambangan 0,04%, dan listrik 0,02%, sementara sektor lain-lain mencapai 47,38%.

Kualitas kredit UMKM mengalami peningkatan yang tercermin dari penurunan rasio NPLs terhadap total kredit UMKM dari 3,67% pada triwulan sebelumnya menjadi 3,39% pada triwulan laporan. Namun terjadi penurunan kualitas pada beberapa sektor yaitu sektor usaha yaitu sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pengangkutan yang masing-masing menjadi 4,01%, 7,85%, 4,19%, dan 3,04%. NPLs tertinggi pada triwulan laporan dialami oleh jasa sosial masyarakat sebesar 15,19%, namun mengalami sedikit peningkatan kualitas bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 16,08%.

Tabel 3.10. Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau

No	Sektor Ekonomi	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)
1	Pertanian	3,35%	2,80%	4,01%	3,85%	4,01%
2	Pertambangan	0,00%	11,38%	10,19%	3,23%	0,00%
3	Perindustrian	14,54%	5,86%	8,55%	7,43%	7,85%
4	Listrik, Gas dan Air	0,00%	0,00%	22,30%	15,35%	3,61%
5	Konstruksi	9,36%	8,92%	9,22%	9,60%	8,31%
6	Perdag., Resto. & Hotel	3,36%	3,22%	3,67%	4,01%	4,19%
7	Pengangkutan, Pergud.	3,34%	2,41%	2,92%	2,93%	3,04%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	2,25%	1,73%	2,41%	4,52%	3,03%
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	13,24%	16,63%	16,30%	16,08%	15,19%
10	Lain-lain	2,23%	2,31%	2,30%	2,61%	2,20%

*) data sampai dengan Agustus 2007

Bila dilihat dari penyebarannya, maka dalam triwulan laporan NPLs UMKM tertinggi masih tercatat di Kota Dumai, yaitu mencapai 6,41%, namun mengalami perbaikan kualitas dibandingkan triwulan sebelumnya, berbeda dengan NPLs secara keseluruhan, dimana Kota Dumai menjadi salah satu yang mempunyai NPLs terendah. Sedangkan NPLs UMKM terendah juga masih tercatat di Kabupaten Indragiri Hulu yang tercatat 0,95%, namun NPLs pada kabupaten ini mengalami penurunan kualitas dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan kualitas kredit UMKM terjadi hampir di semua kota/kabupaten, kecuali di Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hulu.

Tabel 3.11. Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)
1	Pekanbaru	3,85%	3,13%	3,91%	4,02%	3,99%
3	Bengkalis	1,53%	0,80%	1,36%	2,17%	2,20%
2	Dumai	6,13%	6,46%	6,37%	6,79%	6,41%
5	Indragiri Hilir	2,12%	0,85%	1,35%	1,77%	1,33%
4	Indragiri Hulu	1,42%	0,47%	1,04%	0,93%	0,95%
6	Lainnya	0,70%	2,11%	1,03%	2,78%	1,25%

*) data sampai dengan Agustus 2007

3.1.5. Kondisi Likuiditas

Dana jangka menengah dan panjang mengalami peningkatan 16,84%, sementara dana jangka pendek meningkat 7,14%. Di sisi lain, alat likuid perbankan berupa kas dan SBI mengalami peningkatan sebesar 6,63% yang disebabkan oleh peningkatan pada komponen SBI perbankan meskipun kas perbankan mengalami penurunan. Pertumbuhan dana jangka pendek yang lebih tinggi daripada peningkatan alat likuid mengindikasikan menurunnya kondisi likuiditas perbankan Riau.

3.1.5.1. Perkembangan dan Struktur Dana Pihak Ketiga

Posisi Dana Pihak Ketiga dalam triwulan laporan tercatat sebesar Rp.29.285 miliar, naik sebesar Rp.2.007 miliar (4,20%) dari DPK triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.27.278 miliar. Peningkatan ini mencerminkan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian di Provinsi Riau.

Tabel 3.12. Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Riau (Miliar Rp)

Keterangan	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)
Jangka Pendek					
- Giro	10.330	12.166	11.166	11.002	12.263
- Tabungan	7.299	9.157	8.625	9.124	9.811
- Deposito (s.d 3 bln)	6.114	5.700	5.796	6.553	6.511
Total	23.742	27.023	25.586	26.679	28.585
Jangka Menengah dan Panjang					
- Deposito 3-6 bln	209	223	272	312	344
- Deposito 6-12 bln	233	234	218	267	326
- Deposito > 12 bln	75	167	103	21	31
Total	517	625	593	600	701
Total DPK	24.259	27.648	26.179	27.278	29.285

*) data sampai dengan Agustus 2007

Peningkatan DPK terjadi pada semua komponen dana dimana giro dan tabungan masing-masing mengalami peningkatan sebesar 11,47% dan 7,52%. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan *maturity* (jatuh tempo), deposito berjangka pendek (s.d. 3 bulan) mengalami penurunan (0,64%), sementara deposito berjangka waktu menengah dan panjang mengalami peningkatan sebesar 16,84%, terutama komponen deposito >12 bulan yang tumbuh mencapai 45,73% dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini terjadi karena kecenderungan penurunan suku bunga sehingga masyarakat lebih memilih menanamkan dananya pada deposito berjangka menengah dan panjang untuk mempertahankan pendapatan bunga yang diterimanya.

Berdasarkan kepemilikannya, dalam triwulan laporan kepemilikan DPK masih tetap didominasi oleh nasabah perorangan dengan pangsa 52,60% dari total DPK, diikuti dengan nasabah pemerintah daerah dengan pangsa 33,40%. Sementara itu, peningkatan tertinggi terjadi pada kepemilikan dana pemerintah pusat, yang mengalami peningkatan sebesar 88,28%, namun hanya memiliki pangsa 0,83% dari total DPK.

Tabel 3.13. Sebaran DPK menurut kepemilikan di Provinsi Riau (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kepemilikan	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)	Δ
1	Pemerintah Pusat	77.170	332.244	146.652	129.184	243.223	88,28%
2	Pemerintah Daerah	7.988.156	8.810.308	8.717.756	8.775.944	9.780.096	11,44%
3	Badan/ Lembaga Pemerintah	305.303	283.123	262.742	106.510	99.102	-6,96%
4	Badan Usaha Milik Negara	173.289	298.184	188.739	294.488	179.532	-39,04%
5	Badan Usaha Milik Daerah	23.398	31.091	14.738	45.737	52.739	15,31%
6	Perusahaan Asuransi	111.515	176.575	215.061	255.689	242.895	-5,00%
7	Perusahaan Swasta	1.814.267	2.571.259	2.013.415	2.439.163	2.521.817	3,39%
8	Yayasan dan Badan Sosial	106.550	168.372	221.694	157.779	164.607	4,33%
9	Koperasi	134.047	239.056	319.939	181.070	228.108	25,98%
10	Perorangan	13.166.617	14.298.921	13.714.750	14.524.592	15.404.894	6,06%
11	Lainnya	345.788	430.730	348.934	355.559	361.812	1,76%
12	Bukan Penduduk	13.078	13.616	15.067	12.518	6.259	-50,00%

*) data sampai dengan Agustus 2007

Dilihat dari distribusinya, pangsa DPK terbesar masih ditempati oleh Kota Pekanbaru sebesar 55,16%, diikuti oleh Bengkalis dan Dumai masing-masing sebesar 10,95% dan 6,23%. Peningkatan DPK terjadi pada semua kota/kabupaten. Peningkatan terbesar terjadi di Kota Dumai yang naik sebesar 6,40%, namun peningkatan DPK di dominasi oleh Kota Pekanbaru (51,84%). Sementara itu, peningkatan terendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 3,99%.

Tabel 3.14. Penghimpunan DPK berdasarkan kota/kabupaten Di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw IV 06		Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07*)	
		Rp. Juta	%						
1	Pekanbaru	14.730.699	53,27	14.046.210	53,65	15.113.767	55,41	16.154.098	55,16
3	Bengkalis	3.013.455	10,90	2.911.756	11,12	3.029.624	11,11	3.205.453	10,95
2	Dumai	1.741.626	6,30	1.656.496	6,33	1.715.305	6,29	1.825.162	6,23
5	Indragiri Hilir	882.450	3,19	872.256	3,33	928.644	3,40	965.681	3,30
4	Indragiri Hulu	1.258.673	4,55	1.067.302	4,08	1.184.178	4,34	1.236.308	4,22
6	Lainnya	6.026.576	21,79	5.625.467	21,49	5.306.715	19,45	5.898.382	20,14
Jumlah		27.653.479	100	26.179.487	100	27.278.233	100	29.285.084	100

*) data sampai dengan Agustus 2007

Dalam triwulan laporan, jumlah rekening DPK bertambah dari 1.432.155 rekening menjadi 1.661.713 rekening. Penambahan yang cukup signifikan terjadi pada rekening DPK dengan nominal saldo < Rp.1 juta, yang meningkat sekitar 237.604 rekening, (25,95%) sedangkan rekening DPK dengan saldo Rp.50 juta sampai dengan 100 juta rupiah mengalami penurunan terbesar yaitu 3.875 rekening (17,01%). Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mulai menabung di perbankan seiring dengan semakin pulihnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Seiring dengan penambahan rekening pada nominal < Rp.1 juta, maka jumlah nominal pada rekening tersebut juga mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar Rp.126 miliar (24,97%),

sementara pengurangan terbesar terjadi pada nominal Rp.50 juta sampai dengan Rp.100 juta (22,02%). Penurunan ini diperkirakan karena adanya penarikan dana oleh masyarakat dalam rangka menyambut bulan Ramadhan.

Tabel 3.15. Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal Di Provinsi Riau

Klasifikasi	Tw I 07		Tw II 07		Tw III 07*)	
	Jumlah Rekening	Jumlah DPK (Rp)	Jumlah Rekening	Jumlah DPK (Rp)	Jumlah Rekening	Jumlah DPK (Rp)
< Rp.1 juta	979.642	568.694	915.527	506.584	1.153.131	633.067
Rp.1 juta s.d. <Rp.10 juta	203.330	560.285	280.824	721.713	243.836	708.968
Rp.10 juta s.d. <Rp.50 juta	185.332	4.295.640	182.495	3.897.581	213.336	4.660.922
Rp.50 juta s.d. <Rp.100 juta	20.802	1.597.840	22.776	1.713.674	18.901	1.336.361
Rp.100 juta s.d. <Rp.250 juta	19.659	3.256.087	22.587	3.845.683	24.045	4.291.569
Rp.250 juta s.d. <Rp.1.000 juta	5.992	2.751.411	5.722	2.651.695	6.025	2.827.874
Rp.1.000 juta s.d. <Rp.10.000 juta	1.782	4.424.235	2.055	5.310.013	2.281	6.020.560
>=Rp.10.000 juta	150	8.715.915	169	8.631.290	158	8.805.763
Total	1.416.689	26.170.107	1.432.155	27.278.233	1.661.713	29.285.084

*) data sampai dengan Agustus 2007

3.1.5.2. Rasio Alat Likuid

Jumlah alat likuid (kas dan Sertifikat Bank Indonesia) perbankan Provinsi Riau sebesar Rp.8.093 miliar atau meningkat 6,63% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan pada komponen SBI (7,42%) sementara komponen kas mengalami sedikit penurunan (1,60%). Di sisi lain jumlah *Non Core Deposit* (NCD)¹ perbankan Provinsi Riau juga meningkat sebesar 7,14% dari Rp. 8.004 miliar menjadi Rp.8.575 miliar. Peningkatan terjadi komponen giro dan tabungan yang masing-masing tercatat sebesar 11,47% dan 7,52%, sementara komponen deposito berjangka waktu 1 - 3 bulan turun sebesar 0,64% .

Tabel 3.16. Perkembangan Alat Likuid dan *Non Core Deposit*

¹ Non Core Deposit merupakan dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 30% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

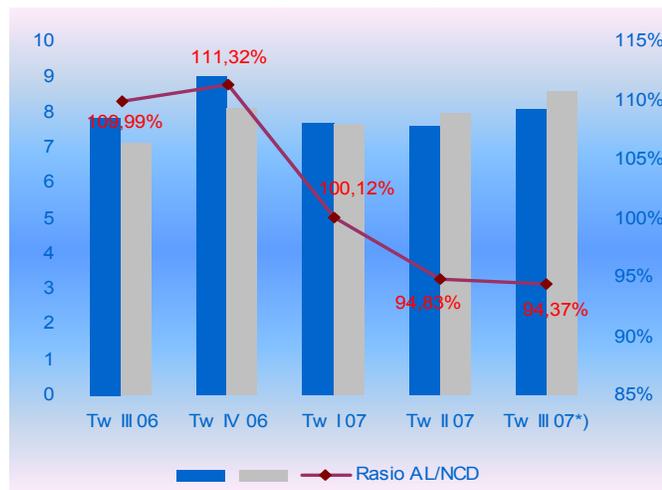
Alat Likuid	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)
Kas	487.409	768.834	576.120	671.645	660.911
SBI	7.346.871	8.255.746	7.108.831	6.918.178	7.431.754
Jumlah	7.834.280	9.024.580	7.684.951	7.589.823	8.092.665

Non Core Deposit (NCD)	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)
Giro (30%)	3.098.887	3.649.679	3.349.662	3.300.474	3.678.901
Tabungan (30%)	2.189.554	2.747.231	2.587.577	2.737.340	2.943.236
Dep 1-3 bln (30%)	1.834.165	1.710.041	1.738.700	1.965.795	1.953.233
NCD	7.122.606	8.106.952	7.675.939	8.003.609	8.575.370

*) data sampai dengan Agustus 2007

Dengan perkembangan tersebut maka rasio Alat Likuid terhadap NCD mengalami penurunan dari 94,83% menjadi 94,37%, yang mengindikasikan turunnya kondisi likuiditas perbankan di provinsi Riau. Sepanjang tahun 2006, rasio ini terus menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan sejak awal triwulan 2007 sampai dengan triwulan III – 2007. Hal ini terjadi karena pertumbuhan NCD lebih tinggi daripada pertumbuhan alat likuid. Walaupun terjadi penurunan, namun rasio tersebut masih cukup aman.

Grafik 3.7. Perkembangan Rasio Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit*



*) data sampai dengan Agustus 2007

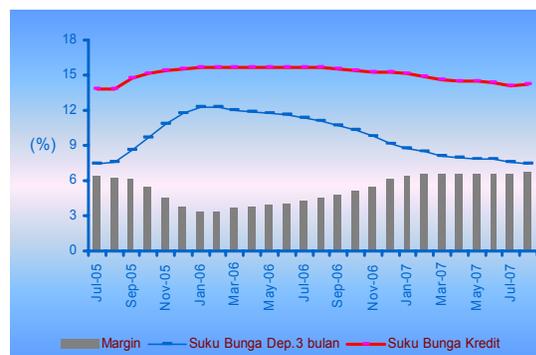
3.1.6. Profitabilitas

Kondisi profitabilitas perbankan Provinsi Riau menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan penyaluran kredit perbankan dan menurunnya jumlah beban operasional perbankan dibandingkan triwulan sebelumnya karena menurunnya suku bunga deposito sementara margin yang dinikmati oleh perbankan mengalami peningkatan.

3.1.6.1. Spread Bunga

Stabilitas ekonomi makro yang relatif terjaga yang ditandai dengan beberapa indikator seperti kecenderungan menguatnya nilai tukar dan inflasi yang terjaga, serta optimisme kalangan dunia usaha terhadap perbaikan kondisi perekonomian membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga BI rate-nya. Selama triwulan laporan BI rate telah mengalami penurunan sebanyak 25 *basis points* (bps), yaitu dari 8,50% pada Juni 2007 menjadi 8,25%. Kalangan perbankan merespon kebijakan ini dengan menurunkan suku bunga deposito (*weighted average*) sebesar 33 bps, dari 7,77% pada akhir Tw II 2007 menjadi 7,44% pada Tw III 2007. Sedangkan suku bunga kredit (*weighted average*) turun sebesar 12 bps dari 14,29% pada akhir Tw II 2007 menjadi 14,17% pada Tw III 2007. Dengan demikian *spread* yang dinikmati perbankan pada triwulan laporan sebesar 6,73%, mengalami sangat peningkatan bila dibandingkan dengan *spread* pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,52%.

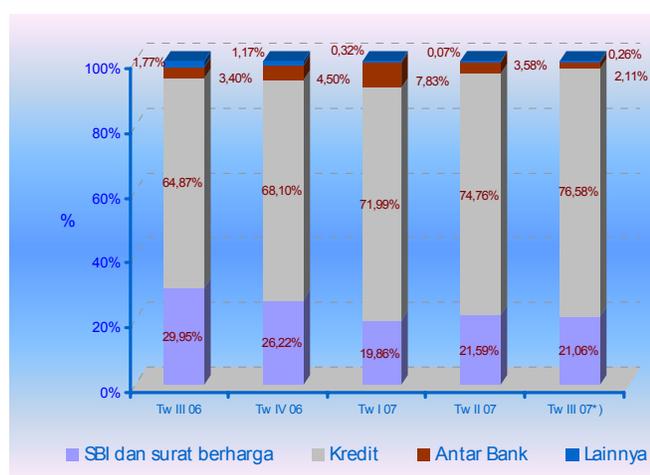
Grafik 3.8. Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito



3.1.6.2. Komposisi Pendapatan Bunga dan Beban Bunga

Selama triwulan laporan, perbankan provinsi Riau mencatat pendapatan bunga sebesar Rp.477 miliar, sehingga sampai dengan triwulan III–2007 tercatat memperoleh pendapatan sebesar Rp.1.841 miliar. Pangsa terbesar berasal dari pendapatan bunga kredit yang mencapai 76,58%, hal ini seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit oleh perbankan, diikuti oleh pendapatan bunga dari SBI dan surat-surat berharga (21,06%), meningkatnya penanaman dalam bentuk SBI oleh perbankan Riau. Peningkatan pendapatan bunga kredit ini juga sebagai akibat dari meningkatnya nominal kredit kategori lancar pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik 3.9. Komposisi Pendapatan Bunga



*) data sampai dengan Agustus 2007

Di sisi lain, beban bunga yang dikeluarkan perbankan selama triwulan laporan, tercatat sebesar Rp.227 miliar, sehingga sampai dengan triwulan III – 2007 mencapai Rp.889 miliar. Terjadi penurunan yang cukup signifikan dari beban DPK yaitu mencapai -29,22%. Pembayaran bunga untuk dana pihak ketiga mencapai 95,79% dari total pembayaran bunga yang dibayarkan oleh perbankan, sehingga jumlah dana pihak ketiga cukup mempengaruhi beban bunga yang dikeluarkan perbankan. Penurunan beban bunga terjadi pada semua komponen dana yaitu giro, tabungan dan deposito. Secara persentase penurunan beban bunga tertinggi dari dana terjadi pada beban bunga deposito yang mengalami penurunan sebesar 32,77%, sehingga membawa pengaruh yang signifikan, karena mempunyai komposisi sebesar 40,41% terhadap total beban bunga pada dana pihak ketiga.

Grafik 3.10. Komposisi Beban Bunga



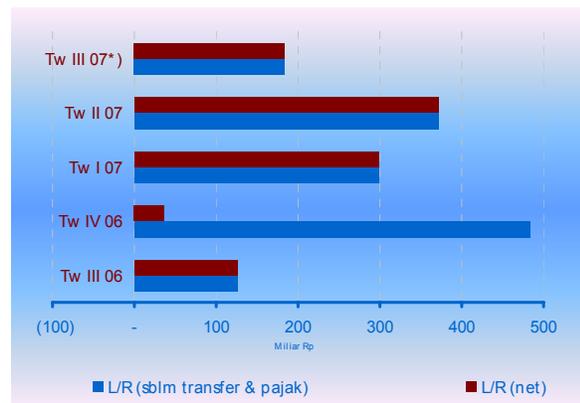
*) data sampai dengan Agustus 2007

Seiring dengan penurunan beban bunga dana pihak ketiga dan peningkatan penyaluran kredit oleh bank, maka *Net Interest Income* (NII) perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan juga mencapai dari Rp. 249 miliar.

3.1.6.3. Perkembangan Laba Rugi

Selama triwulan laporan perbankan Riau mencatat perolehan laba sebesar Rp.183 miliar. Peningkatan laba tersebut disebabkan adanya peningkatan penyaluran kredit dan masih tingginya margin bunga yang dinikmati oleh perbankan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya dari 4,88% menjadi 6,73%.

Grafik 3.11. Perkembangan Laba Rugi (Triwulanan)



*) data sampai dengan Agustus 2007

3.2. Bank Perkreditan Rakyat

Secara umum kegiatan usaha BPR pada triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang menggembarakan dibanding dengan triwulan sebelumnya baik dari jumlah bank, aset, DPK, dan kredit yang disalurkan. Membaiknya kondisi di Provinsi Riau, mendorong pertumbuhan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebanyak 2 kantor selama triwulan laporan, dan saat ini sedang diproses ijin 9 BPR sehingga sampai dengan akhir tahun 2007 jumlah BPR mencapai 27 bank. Aset BPR meningkat 8,99% menjadi 347,78 miliar, peningkatan aset didorong oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp.238,80 miliar atau sebesar 12,71% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan laporan kredit tumbuh 0,35% dari Rp. 199,30 miliar menjadi Rp.200 miliar. Peningkatan jumlah kredit yang disalurkan diikuti oleh peningkatan kualitas kredit BPR/S yang terlihat dari menurunnya rasio NPLs terhadap total kredit dari 8,49% menjadi 6,91%. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit, menyebabkan turunnya angka LDR BPR dari 94,07% menjadi 83,75%

Tabel 3.18. Perkembangan Usaha BPR/BPRS
Di Provinsi Riau (Miliar Rp)

Keterangan	Periode				
	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)
1. Jumlah BPRS	15	15	15	16	18
2. Asset	280,12	277,69	300,16	319,09	347,78
3. DPK	184,38	187,43	201,19	211,86	238,80
4. Kredit	166,55	168,74	184,46	199,30	200,00
5. NPL (nominal)	15,13	12,09	14,62	16,91	13,82
LDR (%)	90,33	90,02	91,68	94,07	83,75
NPLs (%)	9,08	7,16	7,93	8,49	6,91

*) data sampai dengan Agustus 2007

Dilihat dari beberapa indikator, kinerja BPR di Provinsi Riau pada triwulan laporan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, BPR dengan $CAR \geq 20\%$ bertambah 1 BPR, $10 < CAR < 20$ bertambah 2 BPR, sedangkan BPR dengan $ROA < 1$ bertambah 1 BPR, dan $1 < ROA \leq 5$ bertambah 1 BPR, dan $ROA > 5$ juga bertambah 1 BPR.

Tabel 3.19. Indikator Kinerja Utama BPR/BPRS
Di Provinsi Riau

Keterangan	Jumlah BPR/BPRS					
	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)
1. CAR(%)						
a. 1 s.d. < 10	0	1	0	0	0	0
b. 10 s.d. < 20	6	8	1	2	2	4
c. >= 20	9	6	14	13	13	14
2. ROA (%)						
a. < 1	5	6	5	5	4	5
b. 1 - 5	7	6	8	6	7	8
c. > 5	3	3	2	4	4	5

*) data sampai dengan Agustus 2007

3.3. Bank Syariah

Kegiatan perbankan syariah pada triwulan laporan tetap menunjukkan perkembangan semakin membaik dibandingkan dengan triwulan selanjutnya. Dengan jumlah kelembagaan yang masih sama dengan triwulan sebelumnya, yaitu 5 bank yang terdiri dari 2 bank syariah dan 3 Unit Usaha Syariah (UUS).

Tabel 3.20. Indikator Kinerja Utama Bank Syariah Di Provinsi Riau (Miliar Rp)

No.	Keterangan	Periode				
		Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw II 07	Tw III 07*)
1	Jumlah Bank	5	5	5	5	5
2	Asset	591,26	622,35	701,64	790,39	839,13
3	DPK	344,32	456,04	449,63	500,18	517,01
4	Pembiayaan	460,09	476,60	468,13	553,25	648,07
5	Nominal NPF	17,72	19,77	24,27	22,99	22,87
6	NPF	3,85%	4,15%	5,19%	4,16%	3,53%
7	FDR	133,62%	104,51%	104,11%	110,61%	125,35%

Bank Syariah dan UUS

*) data sampai dengan Agustus 2007

Total aset perbankan syariah pada triwulan laporan tumbuh 6,17% menjadi Rp.839,13 miliar. Peningkatan aset ini disebabkan oleh peningkatan dana pihak ketiga sebesar 3,36% menjadi Rp.517,01 miliar. Meningkatnya DPK diimbangi juga dengan peningkatan pembiayaan yang cukup tinggi yaitu tumbuh 17,14% menjadi Rp.648,07 miliar. Berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat, pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dari pertumbuhan dana berdampak pada peningkatan FDR syariah dari 110,61% menjadi 125,35%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan rasio LDR pada bank konvensional maupun BPR.

Dilihat dari sektor yang dibiayai 37,50% pembiayaan diberikan kepada sektor jasa terutama jasa dunia usaha, 18,45% untuk sektor lainnya (konsumsi), 13,79% kepada sektor

pengangkutan (pengangkutan, pergudangan dan komunikasi), dan 13,46% untuk sektor pertanian. Kualitas pembiayaan pada akhir triwulan laporan meningkat bila dibandingkan dengan kualitas pembiayaan pada triwulan sebelumnya, yang terlihat dari penurunan rasio *Non Performing Financing* (NPFs) terhadap total pembiayaan dari 4,16% menjadi 3,53%.

OBLIGASI NEGARA RITEL (ORI) VERSUS DANA PIHAK KETIGA (DPK) PERBANKAN DI PROPINSI RIAU

Dalam rangka pemenuhan target pembiayaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2007, Pemerintah mengeluarkan ORI Seri ORI003 dengan masa penawaran dimulai pada tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 7 September 2007. Penjualan ORI dilakukan melalui agen penjual (bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan) kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia. Adapun target dana yang akan dihimpun melalui penerbitan ORI003 adalah sebesar Rp.3.5 triliun.

Penerbitan ORI selain dapat menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN, juga dapat menjadi alat meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi dan memberikan pilihan kepada investor dalam menanamkan dananya agar memberikan nilai tambah yang lebih baik, pasti, dan terjamin. Sebagai obligasi negara maka ORI merupakan instrumen investasi yang sangat aman karena pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh undang-undang, yaitu undang-undang Surat Utang Negara (SUN) dan APBN.

Selain aman, ORI juga mempunyai beberapa keuntungan lain yaitu; (i) pada saat diterbitkan kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata suku bunga deposito, (ii) berpotensi memberikan *capital gain* (keuntungan) atas perdagangan ORI di pasar skunder, (iii) memberikan kesempatan masyarakat untuk berperan aktif secara langsung dalam pembangunan, dan (iv) mengurangi ketergantungan pembiayaan APBN pada investor institusi termasuk investor asing. Namun demikian sebagai sebuah instrumen investasi ORI juga mempunyai risiko meskipun dapat diminimalisasi, antara lain; (i) risiko gagal bayar (*default risk*) yaitu risiko jika penerbit ORI (Pemerintah) tidak dapat memenuhi kewajibannya, (ii) risiko pasar (*market risk*) yaitu potensi kerugian apabila terjadi kenaikan suku bunga yang menyebabkan penurunan harga ORI di pasar sekunder, dan (iii) risiko likuiditas (*liquidity risk*) yaitu potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik ORI membutuhkan dana tunai dan mengalami kesulitan dalam menjual ORI di pasar skunder pada harga yang wajar.

Penerbitan ORI003 dengan tingkat kupon tetap sebesar 9,40% per tahun atau di atas suku bunga deposito (\pm 6 - 7%) dan SBI sebesar 8,25%, mendapat respon yang positif oleh masyarakat di Propinsi Riau yang ditunjukkan dengan penjualan ORI003 mencapai Rp.178,87 miliar atau 5,11% dari target penerbitan ORI003 secara nasional dengan jumlah investor sebanyak 705 orang. Penjualan ORI003 di Propinsi Riau dilakukan oleh agen penjualan yang terdiri dari 12 bank umum dan 1 perusahaan efek (*securities*).

Terkait dengan penjualan ORI003, kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan pada triwulan III-2007 (Juli – September) tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.1.58 triliun (5,79%), bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan DPK pada triwulan II-2007 sebesar 4,20%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi dana di Riau cukup besar sehingga penerbitan ORI003 tidak memberikan pengaruh negatif terhadap DPK perbankan. Berdasarkan informasi dari bank-bank agen penjual ORI, sebanyak 7 bank menyatakan bahwa penerbitan ORI003 tidak berpengaruh terhadap penghimpunan DPK dan sebagian besar masyarakat (individu) membeli ORI003 tanpa menggunakan dana yang ada pada bank tersebut, sedangkan 5 bank lainnya menyatakan bahwa penerbitan ORI003 mempunyai pengaruh terhadap DPK tetapi tidak signifikan karena DPK yang berasal dari non individu masih cukup besar dan sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang ORI.

Dalam kondisi seperti saat ini dimana penyaluran kredit belum dapat dilakukan secara optimal yang tercermin dari *loan to deposit ratio* (LDR) perbankan di Riau sebesar 52,86%, secara umum penerbitan ORI003 juga memberikan keuntungan bagi bank, antara lain; (i) bertambahnya loyalitas dan kepercayaan nasabah karena bank dapat memberikan informasi tentang alternatif investasi yang baik, terjamin dan aman bagi nasabah, (ii) mengurangi beban bunga antar kantor (BAK) karena adanya perbaikan komposisi pendanaan, serta (iii) meningkatkan *fee base income* bank yang diterima dari hasil *fee* penjualan ORI.

Sebagian besar bank menyatakan bahwa pilihan masyarakat terhadap ORI003 didasarkan pada pertimbangan yang logis, yaitu ORI003 merupakan instrumen investasi yang aman karena dijamin oleh undang-undang (Pemerintah), memiliki suku bunga lebih tinggi dibandingkan deposito, dan cukup likuid karena dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Kondisi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam teori makro Keynesian, yakni keputusan apakah suatu investasi akan dilaksanakan atau tidak tergantung kepada perbandingan antara besarnya *keuntungan yang diharapkan* (yang dinyatakan dalam persentase per satuan waktu) dan biaya penggunaan dana atau *tingkat bunga*.

Berdasarkan data/informasi di atas, secara umum penerbitan ORI memberikan dampak positif baik terhadap pencapaian target pembiayaan APBN dan ketersediaan alternatif investasi khususnya bagi masyarakat (individu), serta memberikan keuntungan bagi perbankan. Kondisi tersebut kiranya dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penerbitan obligasi sejenis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka pembiayaan APBD, dengan tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah.

Bab 4

KETENAGAKERJAAN &

KESEJAHTERAAN

1. Kondisi Umum

Sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, pertumbuhan tenaga kerja di propinsi Riau pada tahun 2006 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian dalam periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja lebih

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran mengalami penurunan.

2. Ketenagakerjaan Daerah

Jumlah penduduk provinsi Riau pada tahun 2006 tercatat sebesar 4,33 juta orang meningkat 2,88% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan jumlah tenaga kerja tercatat sebesar 3,26 juta orang atau meningkat 4,39%. Dalam periode yang sama jumlah angkatan kerja mencapai 2,29 juta atau meningkat 5,55% dan jumlah kesempatan kerja mencapai 2,17 juta atau meningkat 5,76%. Relatif lebih tingginya peningkatan kesempatan kerja dibandingkan dengan peningkatan angkatan kerja, menyebabkan tingkat pengangguran menurun dari 5,23% pada tahun 2005 menjadi 5,04% pada tahun 2006.

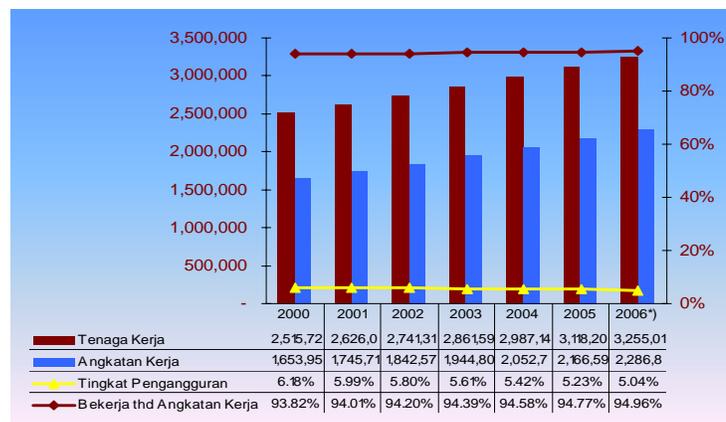
Tabel 4.1. Struktur Penduduk Provinsi Riau

No.	Uraian	Tahun			Δ
		2004	2005	2006*)	
1	Penduduk	4,207,686	4,329,001	4,453,813	2.88%
2	Tenaga Kerja	2,987,147	3,118,207	3,255,019	4.39%
3	Angkatan Kerja	2,052,706	2,166,596	2,286,805	5.55%
4	Bukan Angkatan Kerja	934,440	951,611	968,214	1.74%
5	Bekerja/Kesempatan Kerja	1,941,372	2,053,195	2,171,459	5.76%
6	Pengangguran	111,334	113,401	115,345	1.71%
7	Tingkat Pengangguran	5.42%	5.23%	5.04%	-
8	Setengah Pengangguran	539,562	548,667	557,926	1.69%
9	Bekerja thd Angkatan Kerja	94.58%	94.77%	94.96%	-

*) angka sementara

sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Grafik 4.1. Struktur Penduduk Provinsi Riau



*) angka sementara

sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Berdasarkan Survey Ekspektasi Konsumen (SEK) pada triwulan laporan, indeks ekspektasi masyarakat terhadap jumlah pengangguran dalam 6 – 12 bulan yang akan datang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menunjukkan optimisme konsumen/masyarakat terhadap kondisi ketenagakerjaan yang berarti bahwa konsumen memperkirakan tingkat pengangguran akan berkurang pada 6 – 12 bulan mendatang. Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia secara umum dan masih terbukanya sektor-sektor informal untuk berusaha, serta terbukanya lowongan pekerjaan pada beberapa perusahaan swasta menjadi alasan untuk meyakini tingkat pengangguran akan menurun.

Tabel 4.2. Jumlah Tenaga Kerja per jenjang Pendidikan di Provinsi Riau

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan	
		2005	Share	2006*)	Share	Δ	%
1	Tidak/Belum Tamat SD	211.406	6,78%	181.303	5,57%	(30.103)	-14,24%
2	Tamat SD	910.721	29,21%	904.224	27,78%	(6.497)	-0,71%
3	SLTP	678.733	21,77%	710.956	21,84%	32.223	4,75%
4	SLTA	1.141.144	36,60%	1.262.469	38,79%	121.325	10,63%
5	Diploma I/II/II	84.648	2,71%	94.476	2,90%	9.828	11,61%
6	Universitas	91.557	2,94%	101.590	3,12%	10.033	10,96%
JUMLAH		3.118.209	100,00%	3.255.018	100,00%	136.809	4,39%

*) angka sementara

sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Berdasarkan tingkat pendidikan tenaga kerja tamatan SLTA merupakan bagian terbesar yaitu 38,79% dari jumlah tenaga kerja diikuti oleh tamatan SD sebesar 27,78 %. Sementara itu, tamatan SLTP mencapai 21,84 % dan tidak/belum tamat SD mencapai 5,57%. Sedangkan tamatan Universitas dan Diploma mempunyai pangsa masing-masing sebesar 3,20% dan 2,60%.

Tabel 4.3. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur di Provinsi Riau

No.	Golongan Umur	Tahun				Share	Δ
		2000	2004	2005	2006*)		
1	15 - 19	393.700	425.736	433.250	440.541	13,53%	1,68%
2	20 - 24	445.062	615.321	665.849	719.947	22,12%	8,12%
3	25 - 29	416.622	545.830	582.761	621.689	19,10%	6,68%
4	30 - 34	327.325	402.513	422.994	444.159	13,65%	5,00%
5	35 - 39	268.894	293.832	299.801	305.645	9,39%	1,95%
6	40 - 44	203.199	224.409	229.575	234.671	7,21%	2,22%
7	45 - 49	146.624	164.917	169.486	174.041	5,35%	2,69%
8	50 - 54	102.170	102.774	102.714	102.571	3,15%	-0,14%
9	55 - 59	71.986	60.766	58.125	55.555	1,71%	-4,42%
10	60 - 64	60.041	60.892	60.980	61.020	1,87%	0,07%
11	65+	80.099	90.158	92.672	95.181	2,92%	2,71%
JUMLAH		2.515.722	2.987.148	3.118.207	3.255.020	100,00%	4,39%

*) angka sementara

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Berdasarkan kelompok umur, pangsa tenaga kerja yang berada dalam kelompok 20 – 24 tahun yaitu sebesar 22,12% diikuti oleh kelompok umur 25 – 29 tahun sebesar 19,10%, kelompok umur 30-34 tahun sebesar 13,65% dan kelompok umur 15-19 tahun sebesar 13,53%. Sementara itu, pangsa terendah berada dalam kelompok umur 55 – 59 tahun.

Tabel 4.4. Jumlah Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Riau

No.	Sektor Lapangan Usaha	Tahun				Share
		2000	2004	2005	2006*)	
1	Pertanian	818.224	1.023.665	1.082.629	1.144.988	52,73%
2	Pertambangan	36.801	46.044	48.697	51.503	2,37%
3	Industri	105.260	131.680	139.262	147.282	6,78%
4	Listrik, Gas dan Air	4.774	5.972	6.315	6.679	0,31%
5	Bangunan	63.301	79.196	83.758	88.582	4,08%
6	Perdagangan	224.696	281.114	297.306	314.431	14,48%
7	Perhubungan	70.993	88.819	93.935	99.346	4,58%
8	Keuangan	7.091	8.872	9.384	9.924	0,46%
9	Jasa dan Lainnya	220.615	276.010	291.909	308.723	14,22%
JUMLAH		1.551.755	1.941.372	2.053.195	2.171.458	100,00%

*) angka sementara

sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Berdasarkan lapangan usaha, kesempatan kerja didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 52,73%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Riau bekerja di sektor tersebut. Selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 14,48% dan sektor jasa (jasa dan lainnya) yang mencapai 14,22%. Pangsa terendah berasal dari sektor keuangan dan sektor listrik (listrik, air dan gas) yang masing-masing tercatat sebesar 0,46% dan 0,41% dari jumlah kesempatan kerja.

3. Kesejahteraan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau bulan Maret 2007 sebesar 574,5 ribu jiwa atau 11,20% dari jumlah penduduk Riau, menurun dibandingkan dengan penduduk miskin pada Juli 2005 yang berjumlah 600,4 ribu jiwa atau 12,51% dari jumlah penduduk Riau. Tingkat kemiskinan di Riau memperlihatkan kecenderungan menurun pada periode 2002 sampai dengan 2007. Pada tahun 2002 persentase penduduk miskin di Riau sebesar 15,39% (635.000 jiwa), tahun 2003 sebesar 14,97% (660.700), tahun 2004 sebesar 14,67% (658.600 jiwa), tahun 2005 sebesar 12,51% (600.400 jiwa), dan 2007 sebesar 574.500 jiwa (11,20%). Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2007,

penduduk miskin di Riau sebagian besar berada di daerah perdesaan (12,90%), sedang di perkotaan ada sebesar 9,53%.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Riau

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
2001	-	-	491.000	-	-	10,26
2002	-	-	635.000	-	-	15,39
2003	-	-	660.700	-	-	14,97
2004	-	-	658.600	-	-	14,67
2005	199.900	400.500	600.400	8,26	16,82	12,51
2006*)	-	-	-	-	-	-
2007	246.400	328.200	574.500	9,53	12,90	11,20

Tabel 4.6. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jwa)	Persentase Penduduk Miskin
1	2001	491.600	10,26
2	2002	635.000	15,39
3	2003	660.700	14,97
4	2004	658.600	14,67
5	2005 (Juli)	600.400	12,51
6	2007 (Maret)	574.500	11,20

Tabel 4.7. Garis Kemiskinan di Provinsi Riau

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Jumlah Penduduk Miskin (Jwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Bahan Makanan	Total		
Perkotaan					
Jul-05			196.892	199.900	8,26
Mar-07	161.063	72.669	233.732	246.400	9,53
Pedesaan					
Jul-05			151.718	400.500	16,82
Mar-07	151.357	42.662	194.091	328.200	12,90
Kota + Desa					
Jul-05			167.620	600.400	12,51
Mar-07	156.249	57.785	214.034	574.500	11,20

Garis Kemiskinan Riau pada Maret 2007 sebesar Rp214.034,- per kapita per bulan. Peran komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2007, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,0%. Garis Kemiskinan Makanan Riau tahun 2007 adalah sebesar Rp156.249,- dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp57.785,-

Berdasarkan SK Gubernur No.27 tahun 2006 terjadi peningkatan Upah Minimum Propinsi (UMP) Riau dari Rp637.000,-/bulan menjadi Rp710.000,-/bulan atau meningkat 11,46% sementara KHM tercatat sebesar Rp774.122/bulan. Dengan kondisi tersebut, terjadi ketimpangan yang semakin besar antara Kebutuhan Hidup Minimum dan UMP karena tidak seluruhnya KHM dapat dipenuhi dari UMP. Bagi para pekerja yang mendapatkan upah dibawah UMP, tentunya akan semakin berat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Tabel 4.8. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Riau

No.	Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007
1	UMP	437.500	476.875	551.500	637.000	710.000
2	KHM	467.403	683.735	551.500		774.122
3	UMP/KHM	93,60%	69,75%	100,00%		91,72%

Bab 5

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Kondisi Umum

Aktivitas sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai sampai dengan triwulan laporan menunjukkan peningkatan yang berarti. Dari aktivitas sistem pembayaran tunai *net outflow* yang mencapai Rp2.482,22 miliar atau naik 25,37% dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini merefleksikan masih tingginya permintaan masyarakat terhadap uang kartal terutama untuk persiapan bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Demikian pula halnya dengan transaksi non tunai melalui kliring dan BI – RTGS juga mengalami peningkatan baik dari sisi warkat maupun nominalnya. Jumlah warkat kliring pada triwulan laporan mencapai 251.711 lembar dengan jumlah nominal kliring mencapai Rp5.019.95 miliar. Sementara total transaksi melalui BI – RTGS pada triwulan laporan mencapai Rp78,875,51 miliar.

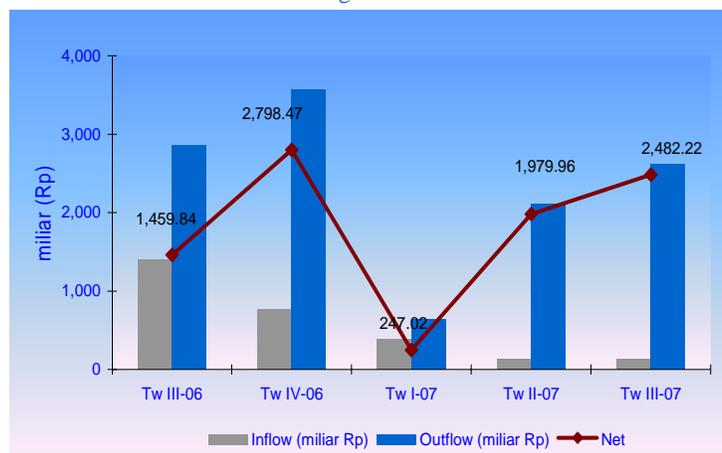
2. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai

2.1. Aliran uang masuk/keluar

Dalam triwulan laporan, aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) dari Bank Indonesia Pekanbaru masih menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yakni dari Rp2.109,73 miliar menjadi Rp2.621,64 miliar atau naik 24,26%. Peningkatan ini ditopang oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap uang kartal dalam persiapan Ramadhan dan Idul Fitri. Diperkirakan permintaan yang tinggi ini masih terus berlanjut sampai dengan triwulan IV 2007, hal ini sejalan dengan aktivitas Pemda untuk percepatan realisasi APBD pada akhir tahun serta natal dan tahun baru. Sementara itu aliran uang yang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*) juga mengalami peningkatan dari Rp129,77 miliar menjadi Rp139,42 miliar atau naik 7,44 % dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah uang yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) ini adalah setoran dari bank atas uang yang tidak layak edar (UTLE). Hal ini sejalan dengan diterapkannya kebijakan uji coba setoran dan bayaran oleh Perbankan, dimana bank hanya diperkenankan melakukan penyeteroran terhadap uang yang tidak layak edar (UTLE) untuk seluruh pecahan ke Bank Indonesia.

Dengan kondisi di atas, pada triwulan laporan tercatat *net outflow* sebesar Rp2.482,22 miliar atau naik sebesar Rp502,28 miliar (25,37%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp1.979,96 miliar.

Grafik 5.1. Perkembangan Kas Inflow dan Outflow



2.2. Penyediaan uang kartal layak edar

Dalam rangka menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia secara rutin melakukan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) terhadap uang yang tidak layak edar baik yang berasal dari setoran bank maupun penukaran uang. Dalam triwulan laporan, jumlah uang kertas yang di PTTB di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru mencapai Rp119,26 miliar atau 85,54 % dari jumlah uang yang masuk (*Inflow*), turun 0,96% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp120,41 miliar atau 92,79 % dari jumlah uang yang masuk.

Selain itu, secara rutin dilakukan kegiatan penukaran uang meliputi : (i) pelayanan penukaran uang lusuh atau rusak yang diselenggarakan pada setiap hari Selasa; (ii) pelayanan penukaran uang pecahan kecil yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis; dan (iii) kegiatan kas keliling atau pelayanan kas yang dilakukan di luar Kantor Bank Indonesia baik di kota Pekanbaru maupun di luar kota Pekanbaru. Khusus mengantisipasi kebutuhan pecahan kecil dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, kegiatan penukaran uang di Bank Indonesia yan semula dilakukan 3 kali dalam seminggu, selama bulan Ramadhan ditingkatkan menjadi setiap hari kerja. Pada triwulan laporan telah dilaksanakan kegiatan kas keliling di kota Pekanbaru dan di luar kota Pekanbaru yaitu Ujungbatu dan Telukkuantan dengan jumlah penukaran mencapai Rp2,22 miliar. Sementara kegiatan penukaran yang dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia dengan jumlah penukaran mencapai Rp23,44 miliar, naik 130,48% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp10,17 miliar. Tingginya permintaan masyarakat tersebut sejalan dengan persiapan Ramadhan dan Idulfitri terutama kebutuhan terhadap pecahan Rp5.000,00 ke bawah.

2.3. Uang Palsu

Jumlah uang palsu yang ditemukan Bank Indonesia Pekanbaru dari setoran bank umum pada triwulan laporan tercatat sebanyak 19 lembar, atau 0,000002% dari jumlah lembar uang kertas yang masuk (*inflow*) ke Bank Indonesia, yang berarti dalam setiap 1 juta lembar uang yang masuk terdapat 2 lembar uang palsu. Walaupun rasio tersebut sama dengan triwulan sebelumnya namun dari sisi bilyet terjadi peningkatan yaitu dari 17 lembar pada triwulan II – 2007, menjadi 19 lembar pada triwulan laporan. Untuk

mengurangi peredaran uang palsu, KBI Pekanbaru terus melakukan berbagai upaya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah secara langsung kepada masyarakat.

3. Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai

3.1. Kliring

Aktivitas transaksi pembayaran nontunai melalui sistem kliring selama triwulan laporan dari sisi warkat meningkat di bandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu mencapai 251.711 lembar atau naik 15.713 lembar (6,66%). Demikian pula halnya pada jumlah nominal kliring, pada triwulan laporan mencapai Rp5.019.948 juta atau naik Rp457.419 juta (10,03%) dari triwulan II – 2007 yang tercatat sebesar Rp4.562.529 juta.

Tabel 5.1. Perkembangan Kliring di Provinsi Riau
(dalam juta rupiah)

Keterangan	Jumlah Warkat		Jumlah Harian		Tolakan Harian	
	Lembar (satuan)	Nominal (juta Rp)	Lembar (satuan)	Nominal (juta Rp)	Lembar (%)	Nominal (%)
Tw III 06	259,144	4,585,400	4,113	72,784	0.81	0.99
Tw IV 06	216,919	4,206,505	3,615	70,108	0.95	0.71
Tw I 07	234,908	4,572,287	3,670	71,442	0.71	0.60
Tw.II 07	235,998	4,562,529	3,806	73,589	0.65	0.52
Tw.III 07	251,711	5,019,948	3,933	78,437	0.79	0.77

Sementara itu, persentase penolakan cek dan bilyet giro kosong per hari pada triwulan laporan naik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah tolakan cek dan bilyet giro kosong tercatat sebesar 0,79% (berdasarkan jumlah warkat) atau sebesar 0,77% (berdasarkan nominal).

3.2. Transaksi *Real Time Gross Settlement (RTGS)*

Transaksi melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI RTGS)* di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru cenderung menunjukkan trend peningkatan. Transaksi non tunai melalui sistem BI RTGS pada triwulan III 2007 mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya baik secara nominal jumlah warkat. Total transfer masuk melalui sistem BI RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp52,67 triliun atau naik 16,66% dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan total transfer keluar tercatat sebesar Rp26,20 triliun atau

naik 16,50% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dengan demikian apabila di *netting* total terjadi peningkatan net *incoming transfer* transaksi RTGS sebesar Rp26,47 triliun atau meningkat 16,81% di banding triwulan sebelumnya. Maraknya aliran dana masuk tersebut diperkirakan akibat masuknya dana perimbangan yang cukup besar.

Tabel 5.2. Perkembangan Transaksi RTGS
(Dalam Miliar)

Keterangan	Kumulatif Triwulanan		Rata-rata Harian	
	Dari	Ke	Dari	Ke
Tw III 06	21,973.21	46,747.90	348.78	742.03
Tw IV 06	29,593.11	60,395.59	485.13	990.09
Tw.I 07	45,252.09	70,619.40	707.06	1,103.43
Trw.II 07	22,489.45	45,146.64	362.73	728.17
Trw.III 07	26,203.53	52,671.98	409.43	823.00

4. Lainnya

4.1. Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing

Pedagang Valuta Asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja KBI Pekanbaru hingga triwulan laporan tercatat 18 perusahaan. Berdasarkan data dari 18 Pedagang Valuta Asing tersebut, nilai pembelian Uang Kertas Asing (UKA) pada periode laporan mencapai USD 3.227 ribu atau meningkat sebesar USD 11 ribu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 3.216 ribu. Sementara itu nilai penjualan, pada periode laporan mencapai USD 3.243 ribu atau naik sebesar USD 2 ribu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 3.241 ribu.

Tabel 5.3. Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing

Keterangan	Pembelian	Penjualan
	USD	USD
Tw III 06	2,705.55	2,767.71
Tw IV 06	2,799.00	2,835.00
Tw I 07	3,172.00	3,196.00
Tw II 07	3,216.00	3,241.00
Tw III 07	3,227.00	3,243.00

4.2. Strategi *Cash Centre* Di Indonesia

Implementasi jangka pendek terhadap kebijakan penerapan *Cash Centre* yang dilaksanakan melalui kegiatan uji coba setoran dan bayaran perbankan antar bank di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Pekanbaru sejauh ini berjalan lancar. Kondisi ini antara lain dapat dilihat dari parameter tidak terjadinya kendala yang cukup berarti dalam kegiatan perkasan bank. Pada triwulan laporan jumlah uang yang masuk ke kas Bank Indonesia mencapai Rp139,42 miliar naik 7,44% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp129,77 miliar.

Bab 6

PROSPEK PEREKONOMIAN

DAERAH

1. Pertumbuhan Ekonomi

Tingginya pertumbuhan ekonomi di triwulan III-2007 (sebesar 8,51%) memberikan sinyal positif terhadap penguatan daya beli masyarakat sehingga optimisme masyarakat terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan perkembangan tingkat harga diperkirakan masih terus menguat pada triwulan IV-2007 dan tahun 2008 nanti. Kondisi tersebut juga diperkuat kenaikan yang cukup signifikan pada survei penjualan eceran yang menunjukkan indikasi peningkatan daya beli masyarakat melalui berbagai kelompok barang.

Momentum pertumbuhan yang cukup baik diperkirakan akan terus berlanjut

Secara umum, momentum pertumbuhan yang terjadi selama tahun 2007 cukup baik dengan *trend* yang terus meningkat masing-masing dari 7,41% pada triwulan I; 7,24% triwulan II; 8,51% triwulan III. *Trend* percepatan pertumbuhan yang semakin baik tersebut tentunya harus terus dijaga agar dapat mendukung penguatan daya beli masyarakat. Namun demikian, beberapa permasalahan di Riau seperti

infrastruktur, distribusi dan spekulasi harga bahan makanan yang terjadi selama tahun 2007 dapat menyebabkan momentum pertumbuhan tersebut kembali melemah apabila tidak segera dibenahi.

Trend percepatan pertumbuhan yang lebih besar ke sektor jasa/tertier pada satu sisi menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar di Riau yang semakin metropolitan. Hal ini ditandai dengan besarnya pangsa sektor tersier yang mencapai 39,2%. Namun di lain pihak, karakteristik ekonomi Riau yang berbasis agroindustri justru harus tetap mendapat perhatian utama dan sebaliknya selama tahun 2007 belum menunjukkan pembenahan struktural yang cukup memadai. Produktivitas sektor pertanian relatif melemah dengan kontribusi yang semakin kecil yakni dari 30,02% menjadi 24,09%. Sub sektor perkebunan meningkat cukup baik, namun menghadapi berbagai kendala seperti kebutuhan *replanting* (penanaman kembali) yang cukup besar serta pengalihan areal perkebunan kepada produksi jangka pendek yang lebih menghasilkan. Namun upaya revitalisasi perkebunan dengan pola pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang digagas diharapkan dapat memperkuat pembenahan sub sektor tersebut sekaligus mendorong aktivitas ekonomi rakyat yang dapat mengentaskan kemiskinan. Selain itu, pembangunan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura juga perlu mendapat perhatian serius mengingat adanya ketersediaan lahan yang memadai dan untuk mengurangi ketergantungan dengan propinsi lain.

Dari sisi infrastruktur, krisis listrik yang terjadi diperkirakan akan segera dapat teratasi pada tahun 2008. Berbagai upaya penyelesaian seperti mengembangkan kapasitas pembangkit tenaga listrik, telah diselesaikannya pembangunan beberapa proyek pembangkit listrik (PLTD), hingga alternatif energi pembangkit listrik lainnya berbasis batubara merupakan proyek jangka menengah panjang yang akan membebaskan Riau dari masalah listrik pada tahun 2009. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya percepatan interkoneksi Sumatera bagian tengah (Sumbagteng) dengan Sumatera bagian utara (Sumbagut) sehingga hal ini menjadi sangat krusial mengingat pasokan listrik, gas dan minyak yang tidak stabil dapat mengganggu kelancaran produksi yang berimbas pada kelangsungan hidup perusahaan

Stimulus pembangunan dari realisasi belanja modal oleh pemerintah juga memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2007. Kendala realisasi keuangan pemerintah dapat menghambat pembangunan fisik dan perbaikan jalan yang pada

akhirnya dapat menimbulkan permasalahan distribusi dan dapat mengurangi minat penanaman modal baik dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA) di Riau.

Kestabilan inflasi di tahun 2007 diperkirakan akan sedikit mengalami gangguan akibat adanya isu kenaikan BBM, dan adanya tekanan dari sisi permintaan akibat terjadinya penguatan daya beli masyarakat

2. Inflasi

Inflasi yang stabil dengan level yang rendah selama tahun 2007 diperkirakan akan mengalami gangguan di akhir tahun 2007 dan terus akan berlanjut di tahun 2008, hal ini akan terjadi apabila pemerintah merealisasikan kenaikan harga BBM akibat imbas naiknya harga minyak dunia. Untuk itu, perlu dilakukan langkah antisipatif untuk menjaga kestabilan harga kelompok administered price seperti harga listrik dan BBM. Potensi tekanan inflasi di awal tahun 2008 dapat terjadi mengingat maraknya aktivitas ekonomi di akhir tahun terutama dari sisi pemerintah dalam merealisasikan APBD yang tidak optimal, serta adanya aksi spekulasi dan kendala distribusi barang. Tekanan inflasi tahun 2008 juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan semakin membaiknya daya beli masyarakat.

Perkembangan ekonomi makro yang makin kondusif berpotensi mendorong peningkatan peran perbankan

3. Perbankan

Dari sisi perbankan, kondisi ekonomi di Riau diperkirakan terus berkembang yang ditandai dengan semakin turunnya tingkat suku bunga kredit. Kondisi tersebut akan mendorong penyerapan kredit yang lebih besar dan meningkatkan peran intermediasi perbankan.

Dari sisi jaringan, jumlah bank umum yang beroperasi di provinsi Riau hingga akhir triwulan laporan tercatat 34 bank dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 312 kantor. Diperkirakan perluasan jaringan kantor bank umum di provinsi Riau masih akan berlanjut, termasuk kemungkinan masuknya bank-bank asing atau campuran.

Saat ini terdapat 2 bank umum yang telah mengajukan izin pembukaan Kantor Cabang di Pekanbaru, sehingga sampai dengan akhir 2007 diperkirakan jumlah bank akan mencapai 36

Tahun 2007, Bank Indonesia Pekanbaru berupaya untuk mendorong peran intermediasi perbankan melalui penguatan lembaga keuangan mikro dan UMKM

bank. Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin matang, dan perkembangan ekonomi di kota/kabupaten yang cukup pesat merupakan insentif bagi bank-bank untuk membuka jaringan kantornya.

Berdasarkan penyaluran kredit dan pembiayaan oleh perbankan di tahun 2007, terlihat bahwa perbankan syariah merupakan tulang punggung pendorong ekonomi sektor riil dengan LDR lebih tinggi dari LDR bank umum konvensional. Selain itu, perbankan juga akan didorong untuk lebih memfokuskan diri dalam mengembangkan UMKM sebagai tonggak pemberdayaan ekonomi rakyat.

Upaya Bank Indonesia Pekanbaru di tahun 2007 dalam meningkatkan peran intermediasi perbankan dan mendorong aktivitas di sektor riil antara lain dengan (1). Mendorong penguatan skala usaha masyarakat melalui peningkatan jumlah bank umum syariah dan pendirian BPR dan BPRS, (2) Mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan pedesaan melalui pemberdayaan UMKM serta (3) Mendorong peran perbankan dalam pembiayaan baik secara langsung maupun dengan program channeling.

Aktiva Produktif

Adalah penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya.

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

Adalah pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan.

Kualitas Kredit

Adalah penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Adalah rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Adalah dana yang diterima perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Inflasi *Administered Price*

Inflasi yang terjadi pergerakan harga barang-barang yang termasuk dalam kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (misalnya bahan bakar).

Inflasi Inti

Inflasi yang terjadi karena adanya gap penawaran agregat and permintaan agregat dalam perekonomian, serta kenaikan harga barang impor dan ekspektasi masyarakat.

Inflasi *Volatile Food*

Inflasi yang terjadi karena pergerakan harga barang-barang yang termasuk dalam kelompok barang yang harganya bergerak sangat volatile (misalnya beras).

Kliring

Adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kliring Debet

Adalah kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggaran kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional.

Kliring Kredit

Adalah kegiatan kliring untuk transfer kredit antar bank yang dikirim langsung oleh bank peserta ke Sistem Sentral Kliring di KP Bank Indonesia tanpa menyampaikan fisik warkat (*paperless*).

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Adalah rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang diterima (giro, tabungan dan deposito).

Net Interest Income (NII)

Adalah antara pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga.

Non Core Deposit (NCD)

Adalah dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Dalam laporan ini, NCD diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 10% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

Non Performing Loans/Financing (NLPs/Ls)

Adalah kredit/pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Adalah suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk. Misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15% dari jumlah kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit macet (setelah dikurangi agunan).

Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)

Adalah rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ysb.

Rasio Non Performing Loans (NPLs) – Net

Adalah rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit

Sistem Bank Indonesia Real Time Settlement (BI RTGS)

Adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)

Adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.